



20
24

LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem

*Mempercepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan*

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
JAKARTA
2024**

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2024

Tim Penyusun :

Penanggungjawab : Direktur Jenderal KSDAE
Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
Ketua : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Penyunting : Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Desain Grafis : Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan, Tim Kerja Data dan Informasi
Ilustrasi Cover : Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan

Diterbitkan oleh :

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat :

Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. 021 5730301, 5730316 Fax 021 5733437
Email : setditjenksdae@menlhk.go.id

Kaleidoskop 2024



JANUARI

Penanaman pohon serentak di Karanganyar. Penanaman ini dilakukan di Dusun Mangli, Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Penanaman pohon serentak di Karanganyar ini merupakan bagian dari kegiatan penanaman pohon serentak seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Hari Gerakan Satu Juta Pohon yang diselenggarakan oleh KAI Group.



FEBRUARI

Penanaman Pohon Serentak Seluruh Indonesia dalam rangka Perayaan Hari Lahan Basah Sedunia Tahun 2024 yang dilaksanakan di kawasan mangrove Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.



MARET

Tim Smart Patrol Seksi Konservasi Wilayah I Sidikalang, Balai Besar KSDA Sumatera Utara berhasil menemukan varian anggrek baru yaitu *Tania wrayana* dan masuk ke dalam family *gastrodia* atau anggrek tanpa bunga.



APRIL

Taman Wisata Alam (TWA) Menipo di Kupang Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan menjadi Situs Ramsar ke 8. TWA Menipo kawasan konservasi di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.



MEI

Garuda muda elang Jawa kembali lahir di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Kelahiran anak elang Jawa di TNGHS menjadi sebuah harapan baru bagi kelestarian populasi elang Jawa untuk menjadi penerus tahta langit Gunung Halimun Salak.



JUNI

Elang Jawa Trail Run. Trail Run tidak hanya menjadi ajang olahraga, tapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya alam dan lingkungan dalam berkehidupan.



JULI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) dalam Rapat Paripurna DPR.



AGUSTUS

Puncak Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN). HKAN menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus menjaga kesinambungan kegiatan konservasi alam dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mari jaga 3 pilar upaya konservasi, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan.



SEPTEMBER

Deklarasi Taman Nasional Mutis Timau sebagai Taman Nasional ke-56 di Indonesia. Deklarasi ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta mengatasi krisis lingkungan global.



OKTOBER

Sosialisasi Nasional UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di Gedung Manggala Wanabakti.



NOVEMBER

Kelahiran gajah Sumatera. Lahir dari pasangan gajah binaan "Robin" dan induk bernama "Ngatini" di Taman Wisata Alam Buluh Cina, Kab. Kampar, Riau.



DESEMBER

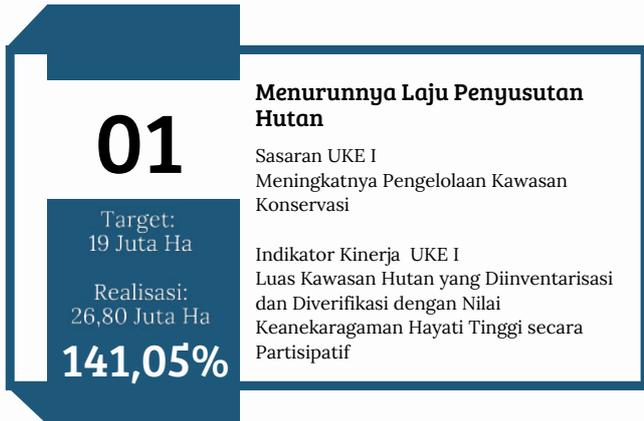
Logo baru Kementerian Kehutanan diibarkan untuk pertama kalinya di bawah air di Tanjung Pairigi Divespot, Pulau Bunaken. Logo baru Kementerian Kehutanan diterbitkan pada 18 November 2024. Logo ini menggantikan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang lama.

Capaian Kinerja

DITJEN KSDAE
Capaian IKP 2024
111,57%

Pencapaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2024 diukur melalui pelaksanaan **6 indikator** kinerja program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK. Pada tahun 2024 rata-rata capaian IKP Ditjen KSDAE adalah sebesar **111,57%**.

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN



PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN



KATA PENGANTAR

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Periode 2020-2024 dengan pencapaian 6 Indikator Kinerja Program rata-rata sebesar 111,57 % dan capaian anggaran sebesar 98,23 %. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama tahun 2024 dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Indikator dan target kinerja yang diperjanjikan dalam periode tahun 2024 yaitu nilai kinerja reformasi birokrasi (nilai SAKIP) Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 82,31 poin, opini WTP atas Laporan Keuangan dan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada level 3.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE dilaksanakan untuk mendukung 3 Program, yaitu Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Kualitas Lingkungan Hidup. Ketiga program tersebut memiliki enam sasaran dan tujuh indikator kinerja program. Sasaran, indikator kinerja, dan target tahun 2024 dituangkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Kehutanan Tahun 2024.

Sasaran program pertama yaitu meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dengan indikator kinerja berupa luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif seluas 19 juta ha. Sasaran program kedua, meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja berupa jumlah nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan sebesar 860 Milyar Rupiah.

Sasaran program ketiga adalah meningkatnya PNBP dari hasil pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari, dengan indikator berupa nilai PNBP dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL secara lestari sebesar 250 Miliar Rupiah. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dalam program keempat adalah meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan indikator kinerja berupa jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebanyak 725 desa.

Sasaran program kelima adalah meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial dengan indikator kinerja berupa luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 9.350.000 ha. Terakhir, sasaran program ke enam adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja program yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar 80 poin.

Pertanggungjawaban atas capaian dari indikator kinerja tersebut dituangkan dalam laporan kinerja. Dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja dan upaya pengelolaan kawasan konservasi yang telah dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan semua pihak yang berperan serta dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Jakarta, 31 Januari 2025
Direktur Jenderal KSDAE,



Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Sc.
NIP. 197108091995121001

RINGKASAN EKSEKUTIF



Ditjen KSDAE mendukung 3 program yaitu Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Kualitas Lingkungan Hidup

Ketiga program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hutan konservasi yaitu 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi sebagai ruang perlindungan keaneka ragaman hayati; 2) Meningkatkan manfaat ekonomi dari kawasan konservasi melalui pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor; 3) Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi; 4) Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan ekosistem esensial sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi; dan 6) Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi

Sasaran yang ditetapkan pada Ditjen KSDAE yaitu 1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati; 2) Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL; 3) Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari;



4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; 5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan 6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen KSDAE tersebut diukur melalui 6 indikator kinerja program yaitu 1) luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 9,35 juta hektar; 2) luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 19 juta hektar;

3) Nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan sebesar 860 Miliar Rupiah; 4) Nilai PNBP dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari sebesar 250 Miliar Rupiah; 5) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebanyak 725 Desa; dan 6) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen KSDAE sebesar 80 Poin.

Penetapan target indikator kinerja program setiap tahunnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2024, dari 6 indikator kinerja program, terdapat 2 indikator kinerja yang telah tercapai melebihi target, sedangkan 4 indikator kinerja yang tercapai kurang dari target.



Capaian indikator kinerja program tersebut yaitu: 1) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi terealisasi seluas 9.353.269 hektar atau 106,45% dari target 9,35 juta hektar; 2) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif terealisasi seluas 26,80 Juta hektar atau 141,05% dari target 19 juta hektar; 3) Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa yang lestari dan berkelanjutan terealisasi Rp. 8,59 Miliar atau 99,97% dari target Rp 860 Triliun; 4) Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari terealisasi Rp 236 Miliar atau 94,40% dari target Rp 250 Miliar; 5) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terealisasi 904 desa atau 124,68% dari target 725 desa; dan 6) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terealisasi 82,31 poin atau 102,89% dari target 80 poin. Rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 111,12%.

Glosarium

ABKT	: Areal Bernilai Konservasi Tinggi	KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
ASN	: Aparatur Sipil Negara	KSA	: Kawasan Suaka Alam
APL	: Areal Penggunaan Lain	KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
BA BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BBKSDA	: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam	PJLKK	: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
BBTN	: Balai Besar Taman Nasional	PK	: Perjanjian Kinerja
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam	PKK	: Pengelolaan Kawasan Konservasi
BPPE	: Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	PKTL	: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
BTN	: Balai Taman Nasional	PN	: Prioritas Nasional
CA	: Cagar Alam	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
CITES	: Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna Fauna and Flora	PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
CONSERVE	: Catalyzing Optimum Management Of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species	PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
HCV	: High Conservation Value	RKK	: Perencanaan Kawasan Konservasi
HL	: Hutan Lindung	Satker	: Satuan Kerja
HP	: Hutan Produksi	Tahura	: Taman Hutan Raya
HPK	: Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	TB	: Taman Buru
HPT	: Hutan Produksi Terbatas	TMC	: Teknologi Modifikasi Cuaca
IKP	: Indikator Kinerja Program	TN	: Taman Nasional
KK	: Kawasan Konservasi	TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
KKHSG	: Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	TWA	: Taman Wisata Alam
		UPT	: Unit Pelaksana Teknis
		SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		SM	: Suaka Margasatwa

Daftar Isi

01

PENDAHULUAN

Tugas dan Fungsi Ditjen KSDAE	1
Struktur Organisasi Ditjen KSDAE	3
Sumber Daya Manusia Ditjen KSDAE	4
Isu-isu Strategis	9

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis DITJEN KSDAE 2020-2024	12
Rencana Kerja DITJEN KSDAE 2024	14
Perjanjian Kinerja DITJEN KSDAE Tahun 2024	15
Perjalanan PAGU Anggaran DITJEN KSDAE 2024	17
Pohon Kinerja DITJEN KSDAE 2024	19

02

03

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Program DITJEN KSDAE 2024	18
Realisasi Anggaran DITJEN KSDAE 2024	22
Nilai Kinerja Anggaran DITJEN KSDAE Tahun 2024	24
Pemantauan Krgiatan Tematik DITJEN KSDAE 2024	25

PENUTUP

Descriptive Statistics	25
Factor Analysis	27
Selection of Factors	30
Rotation of Factors	35

04

Daftar Gambar

01

PENDAHULUAN

Tugas dan Fungsi Ditjen KSDAE	1
Struktur Organisasi Ditjen KSDAE	3
Sumber Daya Manusia Ditjen KSDAE	4
Isu-isu Strategis	9

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis DITJEN KSDAE 2020-2024	12
Rencana Kerja DITJEN KSDAE 2024	14
Perjanjian Kinerja DITJEN KSDAE Tahun 2024	15
Perjalanan PAGU Anggaran DITJEN KSDAE 2024	17
Pohon Kinerja DITJEN KSDAE 2024	19

02

03

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Program DITJEN KSDAE 2024	18
Realisasi Anggaran DITJEN KSDAE 2024	22
Nilai Kinerja Anggaran DITJEN KSDAE Tahun 2024	24
Pemantauan Krgiatan Tematik DITJEN KSDAE 2024	25

PENUTUP

Descriptive Statistics	25
Factor Analysis	27
Selection of Factors	30
Rotation of Factors	35

04

Daftar Gambar

01

PENDAHULUAN

Tugas dan Fungsi Ditjen KSDAE	1
Struktur Organisasi Ditjen KSDAE	3
Sumber Daya Manusia Ditjen KSDAE	4
Isu-isu Strategis	9

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis DITJEN KSDAE 2020-2024	12
Rencana Kerja DITJEN KSDAE 2024	14
Perjanjian Kinerja DITJEN KSDAE Tahun 2024	15
Perjalanan PAGU Anggaran DITJEN KSDAE 2024	17
Pohon Kinerja DITJEN KSDAE 2024	19

02

03

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Program DITJEN KSDAE 2024	18
Realisasi Anggaran DITJEN KSDAE 2024	22
Nilai Kinerja Anggaran DITJEN KSDAE Tahun 2024	24
Pemantauan Krgiatan Tematik DITJEN KSDAE 2024	25

PENUTUP

Descriptive Statistics	25
Factor Analysis	27
Selection of Factors	30
Rotation of Factors	35

04

Daftar Lampiran

LAMPIRAN 1

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal
KSDAE tahun 2024 (Revisi)

???

LAMPIRAN 2

Realisasi Anggaran Satker Lingkup DITJEN KSDAE
Tahun 2024 (Sumber : OMSPAN DITJEN KSDAE

???

LAMPIRAN 3

Data Capaian Kerja Sama Pemberian Akses
Pemanfaatan Tradisional Tahun 2024

???

LAMPIRAN 4

Data penerimaan PNBP dari Tumbuhan dan Satwa
Liar Per Satker Ditjen KSDAE Tahun 2024

???

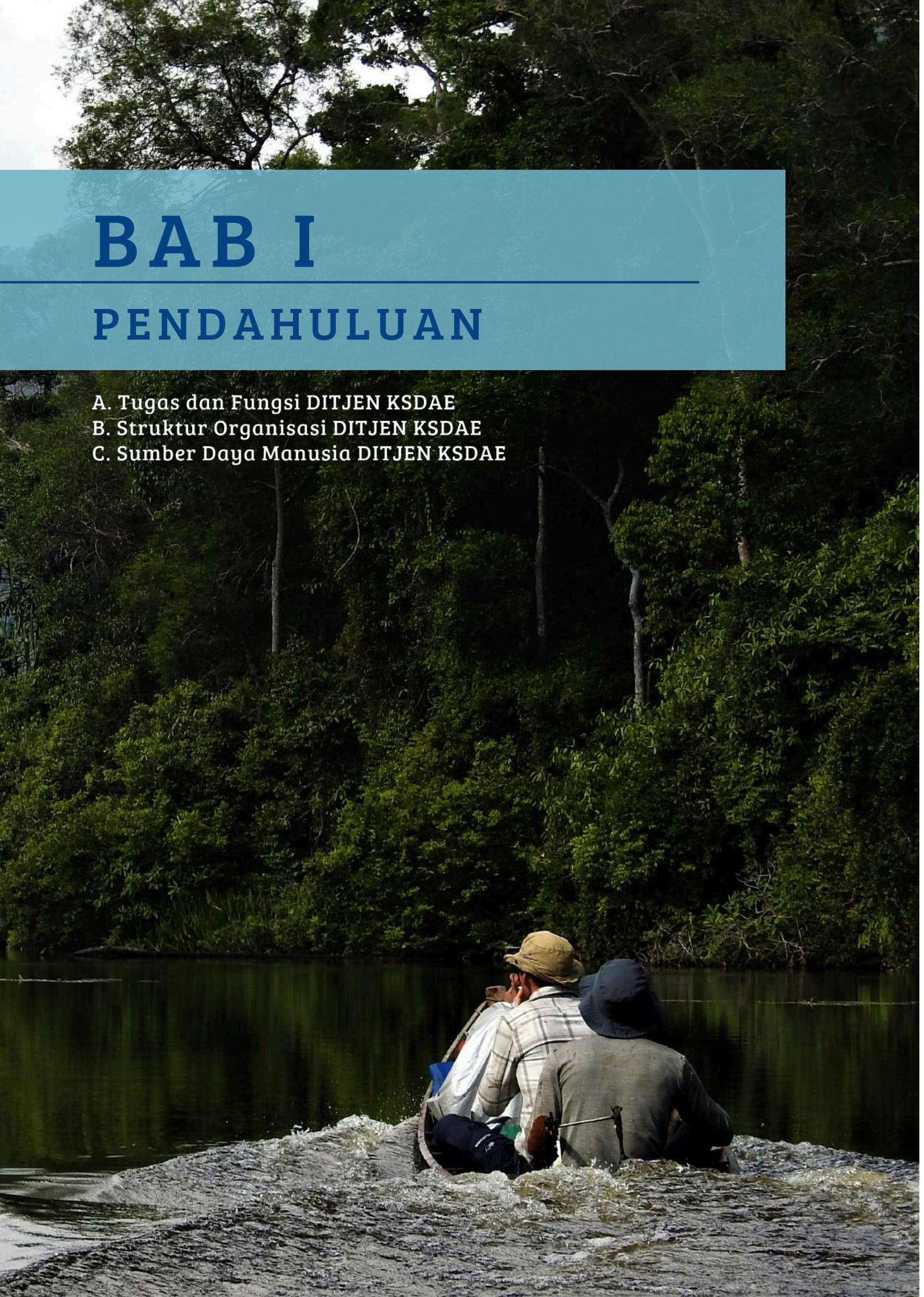


Danau Laot Bangko
Foto: Efa Wahyuni

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Tugas dan Fungsi DITJEN KSDAE
- B. Struktur Organisasi DITJEN KSDAE
- C. Sumber Daya Manusia DITJEN KSDAE



Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem merupakan unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, direktorat jenderal ini memiliki 26 unit B/BKSDA dan 48 unit B/BTN yang tersebar di seantero Indonesia.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) hadir untuk memastikan setiap jengkal kawasan konservasi dan setiap makhluk yang hidup di dalamnya tetap terpelihara demi masa depan yang berkelanjutan. Hutan Indonesia adalah kekayaan yang seharusnya dilestarikan dan dijaga. Karena begitu banyaknya keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang hidup pada hutan-hutan Indonesia.

Ditjen KSDAE senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengelola kawasan konservasi, melindungi habitat satwa liar, dan menjaga fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan.

Dalam satu dekade ke belakang, pengelolaan sistem penyangga kehidupan merupakan fokus dari Ditjen KSDAE. Kemudian Ditjen KSDAE juga melakukan pengelolaan jasa lingkungan yang disediakan oleh ekosistem untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Upaya untuk mengoptimalkan fungsi dan keberadaan semua ekosistem yang ada, seperti hutan dan lahan basah agar memberikan layanan ekosistem yang baik. Contohnya dalam hal pemeliharaan keanekaragaman hayati, pengembangan ekowisata, pelestarian budaya lokal, pengaturan tata air dan konservasi tanah, dan penyerapan karbon. Restorasi ekosistem dilakukan pada area yang telah terdegradasi, dengan aksi penanaman pohon asli, rehabilitasi habitat, dan pemulihan fungsi ekosistem lainnya untuk mengembalikan keseimbangan ekologi. Indonesia dikaruniai 22 tipe ekosistem alami, yang menjadi rumah berbagai spesies flora dan fauna.

Ditjen KSDAE telah mengimplementasikan penggunaan SMART (Spatial Monitoring And Reporting Tools) Patrol di 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memantau dan mengelola kawasan konservasi berdasarkan data yang akurat dari lapangan.



PENDAHULUAN

SMART merupakan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk melindungi Kawasan konservasi. SMART RBM membantu petugas mengumpulkan data lapangan secara real time, mendeteksi ancaman seperti: perburuan liar, penebangan ilegal, serta melaporkan aktivitas konservasi untuk pengelolaan yang lebih efektif dan responsif.

Ini merupakan sebuah langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan di lapangan, telah didasarkan pada data yang akurat dan realtime, meningkatkan efisiensi integrasi informasi, dan menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih optimal.

Ditjen KSDAE juga memberikan atensi terhadap pengelolaan satwa liar Indonesia. Selama satu dekade ini, Ditjen KSDAE telah mengelola konflik antara manusia dan satwa liar yang sering terjadi akibat alih fungsi lahan serta memastikan adanya kecukupan habitat satwa liar untuk mempertahankan populasi satwa.

Sebagai hasil dari pengelolaan satwa liar, tercatat adanya kenaikan populasi elang jawa yang konstan dan signifikan. Pada tahun 2021, populasi elang jawa sudah menyentuh angka 1.437. Selain itu, pada tahun 2024, Ditjen KSDAE juga berhasil merekam peristiwa monumental yakni kelahiran badak jawa, yang sudah tercatat sebagai satwa liar terancam punah.

Ditjen KSDAE juga melakukan program penambahan dan pemeliharaan konservasi yang lebih optimal. Penambahan luas kawasan konservasi melalui penetapan taman nasional dan taman hutan raya baru. Kegiatan ini juga didukung dengan upaya perlindungan terhadap ekosistem-ekosistem yang rentan terhadap ancaman perburuan, dan penggunaan lahan lain yang tidak sesuai aturan.

Hingga tahun 2024, Ditjen KSDAE mengelola unit-unit kawasan konservasi dengan luas total 26,9 juta ha di seluruh Indonesia. Diantaranya, mencakup Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.

Untuk Kawasan konservasi yang mengalami kerusakan, Ditjen KSDAE juga melaksanakan program restorasi dan rehabilitasi secara sistematis, dengan menyusun rangkaian kegiatan dan bekerja untuk memulihkan fungsi ekosistem yang telah terganggu baik disebabkan oleh faktor alam yang tidak dapat dihindari, ataupun perbuatan manusia yang kurang baik.

Salah satunya Ditjen KSDAE telah melakukan aksi-aksi pemulihan pada Suaka Margasatwa Paliyan, Gunung Kidul, Yogyakarta bersama dengan masyarakat desa sekitar, Upaya restorasi ekosistem terealisasi secara optimal.

Pencapaian hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Upaya ini masih jauh dari kata selesai dan tetap mengharapakan kerjasama yang semakin erat, karena alam adalah warisan untuk masa depan bangsa, dan tugas bersama untuk menjaganya adalah tanggung jawab sekarang, esok dan seterusnya.

LATAR BELAKANG

“Kami Direktorat Jenderal KSDAE, percaya bahwa hutan Indonesia adalah kekayaan yang seharusnya dilestarikan dan dijaga. Karena begitu banyaknya keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang hidup pada hutan-hutan Indonesia.”

-Direktur Jenderal KSDAE-

Sebanyak 568 unit kawasan konservasi di Indonesia yang terletak dari Sabang sampai Merauke merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Kawasan konservasi dimaksud terdiri dari 214 unit cagar alam seluas 4,18 juta hektar, 80 unit suaka margasatwa seluas 4,9 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,09 juta hektar, 130 unit taman wisata alam seluas 796 ribu hektar, 39 unit taman hutan raya seluas 383 ribu hektar, 11 unit taman buru seluas 160 ribu hektar serta 40 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 387 ribu hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif.

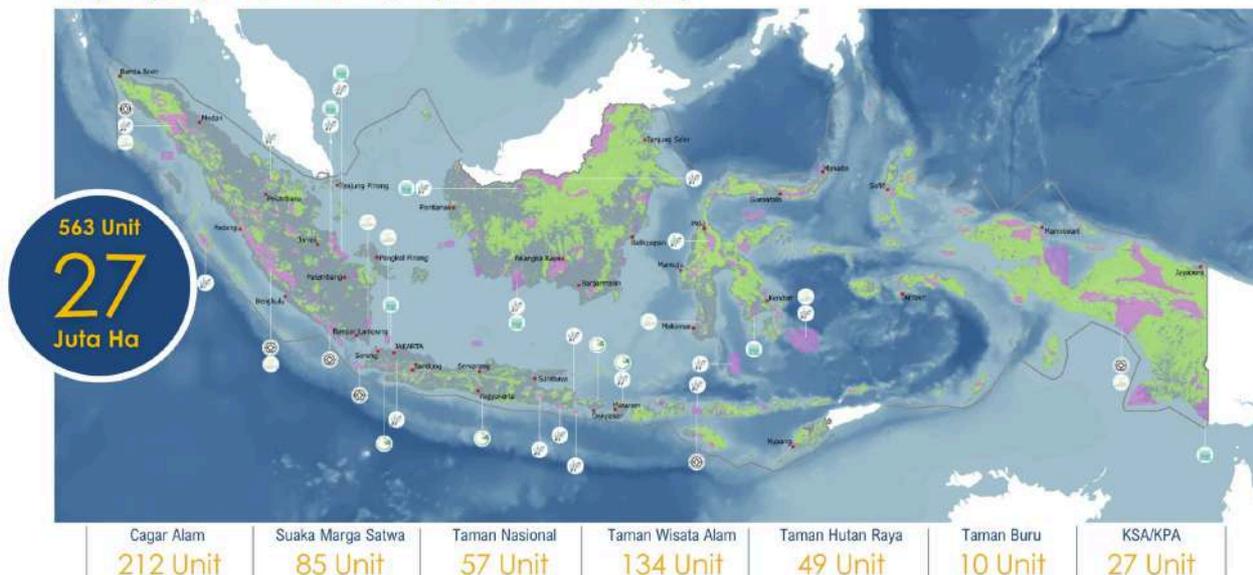
Sebagian besar kawasan konservasi (60% dari total 26,89 juta hektar) merupakan kawasan yang berperan sebagai taman nasional. Beberapa diantaranya telah mendapat pengakuan secara global, yaitu 6 (enam) kawasan sebagai situs warisan dunia (World Heritage Site), 22 (dua puluh dua) kawasan konservasi sebagai cagar biosfer (Biosphere Reserve), 7 (tujuh) kawasan konservasi sebagai Ramsar Site, 7 (tujuh) kawasan konservasi sebagai ASEAN Heritage Site, serta 4 (empat) kawasan konservasi sebagai UNESCO Global Geopark.



Penetapan status atau pengakuan global tersebut merupakan bukti pentingnya kawasan hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia bagi kepentingan Internasional. Keberadaan kawasan konservasi dan dinamika baik yang terjadi di dalam maupun diluar/sekitar kawasan konservasi inilah yang mendasari perlunya upaya-upaya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang menjadi tugas Direktorat Jenderal KSDAE.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE mengacu pada Renstra periode 2020-2024 yang menjadi salah satu bagian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang sejalan juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati mendukung 5 agenda nasional, yaitu: 1) inventarisasi keanekaragaman hayati nasional; 2) peningkatan pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat; 3) perlindungan spesies prioritas nasional; 4) kawasan konservasi sebagai destinasi wisata prioritas nasional; dan 5) pengembangan Balai Kliring Nasional dan Pendanaan Berkelanjutan.

KAWASAN KONSERVASI INDONESIA



Gambar xxx Sebaran Kawasan Konservasi Indonesia

Luas Kawasan Konservasi

563 Unit Kawasan Konservasi seluas
26.910.593,81 Ha

Cagar Alam	: 4.182.814,19 Ha
Suaka Margawatwa	: 4.899.402,88 Ha
Tahura	: 401.966,58 Ha
Taman Nasional	: 16.124.167,53 Ha
Taman Buru	: 138.258,09 Ha
Tawan Wisata Alam	: 787.622,31 Ha
KSA / KPA	376.362,25 Ha

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional, memandatkan KLHK mempertahankan kawasan dengan nilai konservasi tinggi atau Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Untuk mewujudkannya, KLHK membuat Rencana Strategis 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020, dengan menetapkan target mempertahankan 70 juta hektar sebagai kawasan High Conservation Value (HCV).

Untuk mencapai target tersebut, KLHK menetapkan kegiatan prioritas berupa inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Untuk menindaklanjuti mandat tersebut, Direktur Jenderal KSDAE menerbitkan Peraturan Nomor P.1/KSDAE/SET.3/Ren.2/1/2022 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET.3/Ren.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 yang di dalamnya menetapkan kewajiban inventarisasi dan pencatatan spesies penting ekosistem Indonesia. Dari 70 juta hektar kawasan dengan nilai konservasi tinggi, seluas 27 juta hektar berada di dalam kawasan konservasi dan 43 juta hektar di luar kawasan konservasi.

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023, jumlah kawasan konservasi di Indonesia mengalami perbedaan, karena terdapat beberapa perubahan

antar fungsi kawasan hutan maupun perubahan di dalam fungsi kawasan konservasi sendiri, salah satunya adalah perubahan 3 (tiga) kawasan konservasi di NTB yaitu TB Pulau Moyo (RTK 58), TWA Pulau Moyo dan TWA Pulau Satonda menjadi Taman Nasional Moyo Satonda.

Saat ini belum semua kawasan konservasi yang ada di Indonesia, dikelola secara efektif. Keterbatasan anggaran pengelolaan, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, luas kawasan dan aksesibilitas kawasan yang sulit dijangkau, menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Tingginya ancaman atau gangguan kawasan baik oleh faktor alam maupun faktor antropogenik yang disebabkan oleh aktivitas manusia, menyebabkan terjadinya perubahan kondisi kawasan dari saat awal penunjukan atau penetapannya.

Hingga Desember 2024, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah menetapkan sebanyak 573 unit kawasan konservasi dengan total luas kurang lebih 27 juta hektar.

Kawasan konservasi terbagi atas beberapa fungsi, yaitu : Cagar Alam (212 unit), Suaka Marga Satwa (85 unit), Taman Nasional (57 unit), Taman Wisata Alam (134 unit), Taman Hutan Raya (49 unit), Taman Buru (10 unit) dan yang masih berstatus KSA/KPA (27 unit).

Secara garis besar Indonesia terbagi ke dalam 7 region, jumlah dan luas kawasan konservasi pada masing-masing region adalah :

Region Sumatera terdapat 159 unit KK dengan total luas kurang lebih 5,3 juta hektar; Region Jawa terdapat 134 unit dengan total luas kurang lebih 805 ribu hektar; Region Kalimantan terdapat 66 unit dengan total luas kurang lebih 5,2 juta hektar; Region Bali Nusa Tenggara terdapat 60 unit dengan total luas kurang lebih 726 ribu hektar; Region Sulawesi terdapat 75 unit dengan total luas kurang lebih 4,2 juta hektar; Region Maluku terdapat 30 unit dengan total luas kurang lebih 650 ribu hektar; Region Papua terdapat 49 unit dengan total luas kurang lebih 10 juta hektar.



Gambar xxx Peta Kawasan Konservasi Indonesia

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada BAB V Pasal 132-133, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Ditjen KSDAE berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki susunan organisasi Unit Kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE;
2. Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi;
3. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi;
4. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik;
5. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; dan
6. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE jo Peraturan Menteri LHK Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tanggung jawab mencapai target pembangunan tersebut dilaksanakan oleh 6 (enam) eselon II di tingkat pusat sebagai penanggung jawab kegiatan,

Sedangkan teknis operasionalnya di lapangan menjadi tanggung jawab Unit Pengelola Teknis (UPT). UPT Ditjen KSDAE terdiri dari 26 UPT Konservasi Sumber Daya Alam (8 Balai Besar KSDA dan 18 Balai KSDA) dan 48 UPT Taman Nasional (8 Balai Besar TN dan 40 Balai TN), sehingga total 74 UPT lingkup Ditjen KSDAE di seluruh Indonesia, terdapat beberapa taman nasional yang baru ditetapkan, yaitu Taman Nasional yang baru diresmikan antara lain, Taman Nasional Moyo Satonda, Taman Nasional Gunung Maras, Taman Nasional Zamrud, dan Taman Nasional Gandang Dewata.

Struktur Organisasi

DIREKTORAT JENDERAL KSDAE



Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc.
Direktur Jenderal KSDAE



Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M.
Sekretaris Ditjen KSDAE



Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si
Direktur RKK



Nunu Anugrah, S.Hut., M.Sc
Direktur KKHS



Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum
Direktur BPPE



Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si
Direktur PKK



Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc
Direktur PJLKK



26 Kepala Satker KSDA



48 Kepala Satker TN



SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal KSDAE per Desember 2024 sebanyak 7111 orang yang terdiri dari 5.608 PNS dan 1.503 PPPK. Ditjen KSDAE mempunyai polisi kehutanan sebanyak 1.920 orang yang mempunyai tugas untuk melindungi kawasan konservasi, pengendali ekosistem hutan sebanyak 1.624 orang yang mempunyai tugas menginventarisasi tumbuhan dan satwa yang berada dalam kawasan serta penyuluh kehutanan sebanyak 624 orang.

Proporsi jumlah seluruh pegawai Direktorat Jenderal KSDAE diantaranya terdiri dari 5.366 orang laki-laki dan 1.745 orang perempuan atau jika dipersentasikan untuk pegawai laki-laki 76 % dan pegawai perempuan 26 %.

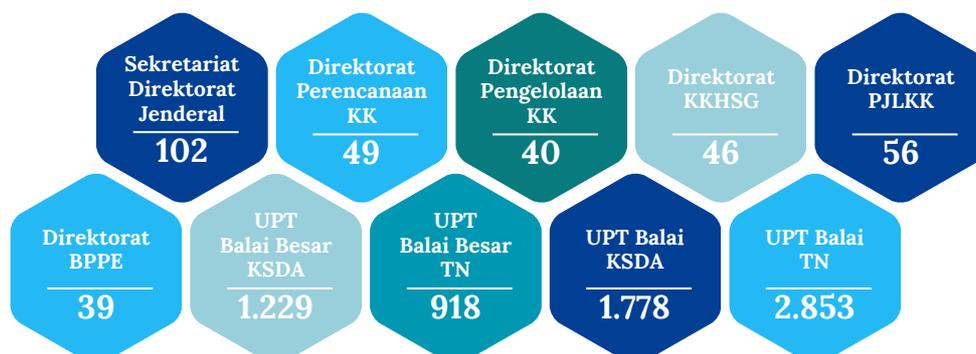
Proporsi pegawai berdasarkan rentang usia 50-59 tahun sebesar 1.485 pegawai (36%), rentang usia kedua yakni di rentang usia 40-49 tahun sebesar 2.673 pegawai (64%), sedangkan rentang usia terendah yang lebih dari 60 tahun sebesar 2 pegawai.

Proporsi pegawai berdasarkan komposisi tingkat pendidikan tertinggi yaitu pada tingkat pendidikan S1 sebesar 2.951 pegawai (41,6%), tingkat pendidikan S2 sebesar 873 pegawai (12,3%), tingkat pendidikan S3 sebesar 29 pegawai (0,4%), sedangkan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 2.679 pegawai (37,8%) dan SLTP sebanyak 59 pegawai (0,8%).

Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal KSDAE memiliki pegawai sebanyak 7111 orang yang terdiri dari 5608 orang ASN dan 1503 orang PPPK yang tersebar di unit kerja pusat dan UPT. Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tahun 2023 (10.487 orang) mengalami penurunan sebesar 3377 orang. Penurunan jumlah ASN dikarenakan adanya penyesuaian rekrutmen PPPK yang dibuka untuk umum dan khusus.

Rekrutmen secara khusus diperuntukkan bagi PPPN yang sudah mengabdikan di Ditjen KSDAE. Jumlah pegawai pada unit kerja pusat sebanyak 332 orang pegawai yang terdiri dari 275 orang ASN dan 57 orang PPPK. Sedangkan di UPT jumlah pegawai sebanyak 6778 orang pegawai yang terdiri dari 5332 orang ASN dan 1446 orang PPPK. Adapun sebaran jumlah pegawai Direktorat Jenderal KSDAE Unit Kerja Pusat dan UPT ditampilkan dalam gambar berikut.

**SEBARAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
UNIT KERJA PUSAT DAN UPT**



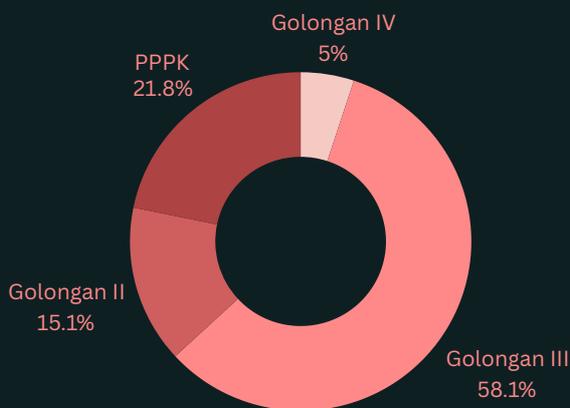
Sumber Daya Manusia Ditjen KSDAE



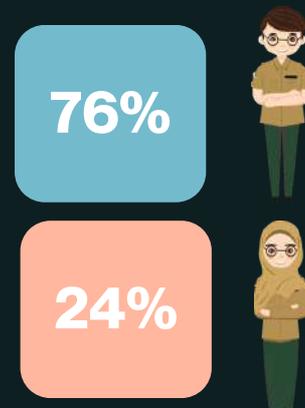
TOTAL PEGAWAI
7111

ASN **5608** PPPK **1503**

Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan



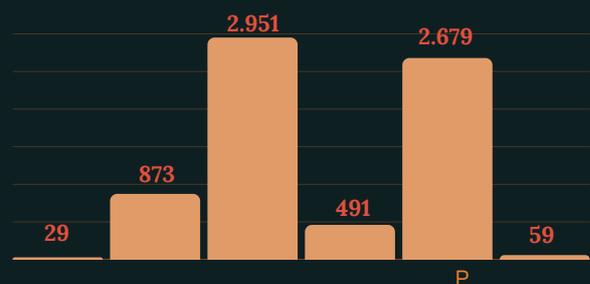
Statistik Pegawai Berdasarkan Gender



Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan



Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan





BAB II

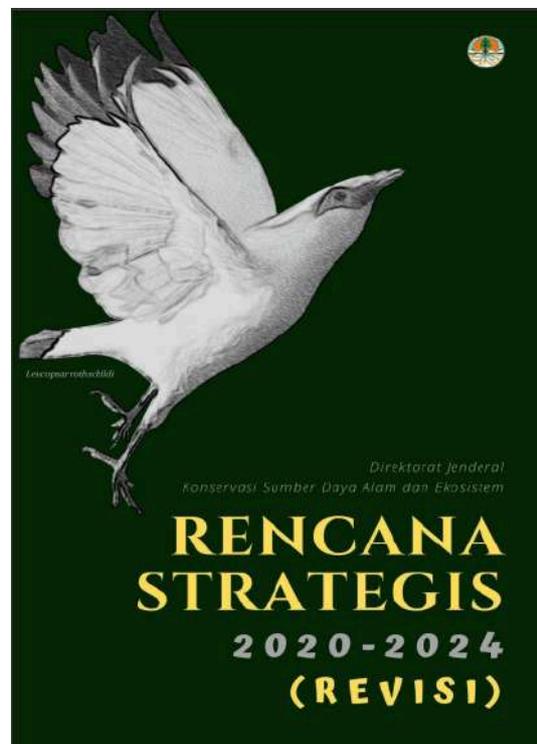
PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis DITJEN KSDAE 2020-2024
- B. Rencana Kerja DITJEN KSDAE 2024
- C. Perjanjian Kinerja DITJEN KSDAE Tahun 2024
- D. Perjalanan PAGU Anggaran DITJEN KSDAE 2024
- E. Pohon Kinerja DITJEN KSDAE 2024

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal KSDAE

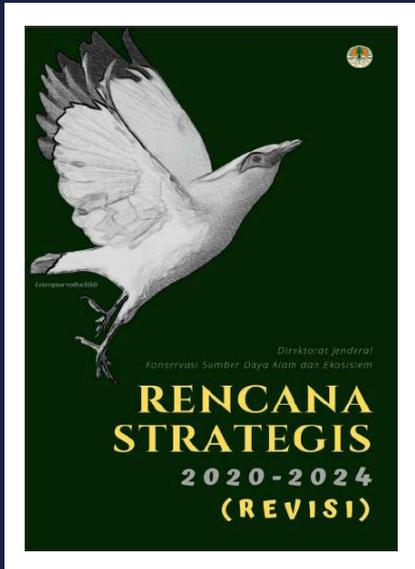
Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya ini. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, yaitu: konservasi, pemanfaatan secara lestari dan pembagian yang adil atas manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Kawasan Konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan Pemerintah adalah untuk menjamin bahwa kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di dalamnya dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di Indonesia. Rencana strategis diperlukan untuk mengelola, melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya baik pada kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah “Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk Kesejahteraan Masyarakat yang mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.



PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020 -2024



Rumusan Misi Direktorat Jenderal KSDAE dan Mendukung Misi KLHK

Mewujudkan :

- Perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas
- Pemanfaatan TSL yang berkualitas
- Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas
- Manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
- Pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif
- Tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik

Visi Direktorat Jenderal KSDAE

Terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem untuk kesejahteraan masyarakat yang mendukung keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Tujuan Pembangunan Hutan Konservasi

Meningkatnya :

- Kualitas Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati
- Manfaat Ekonomi Bagi Negara dari Kawasan Konservasi
- Kualitas Pemanfaatan TSL dalam Mendukung Peningkatan Nilai Ekspor
- Kualitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- Manfaat Hutan Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
- Kualitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- Manfaat Hutan Konservasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran

Meningkatnya :

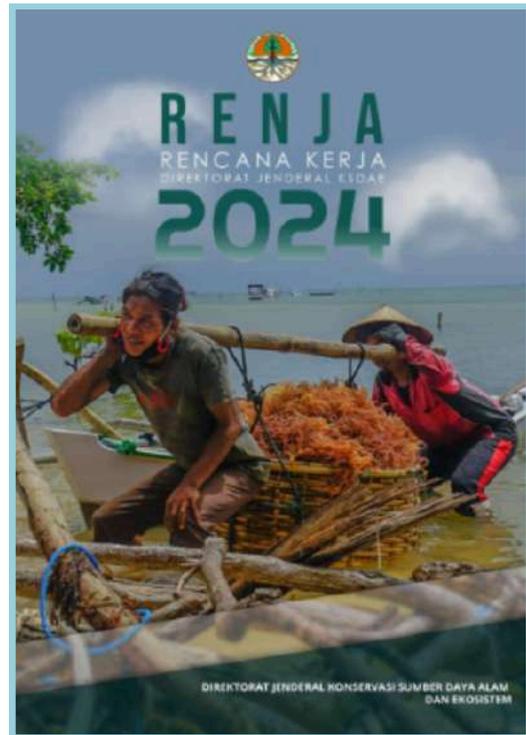
- Pengelolaan kawasan konservasi
- Nilai ekspor pemanfaatan TSL yang lestari dan berkelanjutan
- PNPB dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari
- Kemitraan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi
- Pengelolaan kawasan ekosistem esensial
- Akuntabilitas kinerja lingkup Ditjen KSDAE



B. Rencana Kerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal KSDAE

Rencana Kerja (Renja) merupakan turunan dari Renstra dan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada periode tersebut. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) disusun mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024. Rencana Kerja tahun 2024 ini disusun secara paralel dengan proses penyusunan R-APBN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, sehingga dapat memperkuat internalisasi pembangunan nasional ke dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 diarahkan untuk memenuhi sasaran pembangunan nasional yang dirangkum dalam tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya untuk menginternalisasi pembangunan nasional tahun 2024 ke dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga setiap entitas



tidak mampu memproduksi barang/jasa yang pada akhirnya dapat menumbuhkan geliat ekonomi dan kondisi lingkungan serta kehidupan sosial yang semakin baik.

Untuk itu, milestone pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2024 diringkas dalam narasi utama pendulum perubahan yang mengayunkan geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memenuhi perbaikan kualitas reformasi birokrasi yang diharapkan memiliki dampak nyata di setiap provinsi dan nasional, sasaran utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dirumuskan dalam ukuran keberhasilan, yaitu:

1. Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK sebesar 3-4%. Didalam konteks pembangunan nasional, sasaran ini akan digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbaikan iklim investasi dan surplus neraca perdagangan non migas;
2. Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat (KUPS, KTH, Kelompok Pemberdayaan Masyarakat di hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung, Kelompok Usaha Bank Sampah) sebesar 5-7%. Sasaran ini akan diartikulasikan dan harmonisasikan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan indeks desa membangun; dan
3. Penurunan beban lingkungan sebesar 2-3%. Angka ini didekati dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, penurunan laju penyusutan hutan, dan perbaikan parameter lingkungan hidup termasuk penurunan timbulan sampah dan limbah. Keberhasilan dari sasaran ini akan digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan memperkuat narasi pembangunan Indonesia yang semakin netral karbon.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong pemenuhan kinerja 3 program (Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kualitas Lingkungan Hidup dan Dukungan Manajemen) oleh Direktorat Jenderal KSDAE, yaitu menurunkan laju deforestasi di hutan konservasi, pemulihan ekosistem kawasan konservasi dan pengelolaan reformasi birokrasi berdampak serta manajemen talenta. Sejalan dengan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, output utama yang diharapkan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2024, yaitu: 1) pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort; 2) fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi; dan 3) pengembangan kapasitas kelompok masyarakat wisata alam.



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal KSDAE

Penugasan untuk pelaksanaan program dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Direktur Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2024 mengalami satu kali revisi dikarenakan adanya perubahan metode pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai mana tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan

Anggaran, terdapat anggaran terblokir sebesar RP. 6.810.817.000 dikarenakan Kebijakan Nasional Automatis Adjustment dan Penghematan Perjalanan Dinas, perubahan target Indikator Kinerja Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat menjadi 725 Desa, perubahan target Indikator Kinerja Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan menjadi 860 Miliar. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2024 terdiri dari 6 sasaran program dan 6 indikator kinerja program.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	19 Juta Hektar
Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	860 Miliar
Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	250 Milliar
Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	725 Desa
Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	9,35 Juta Hektar
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	80 Poin

Gambar xxx Info Grafis Perjanjian Kinerja tahun 2024 Ditjen KSDAE

D. Perjalanan PAGU Anggaran Tahun 2024 Direktorat Jenderal KSDAE

Pada awal tahun 2024, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp.1.773.960.108.000,-. Sejalan dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan, terdapat beberapa tahapan perubahan pagu alokasi anggaran Ditjen KSDAE, yaitu:

- Pada bulan Januari 2024, telah dilakukan revisi Blokir Automatic Adjustment (AA), sehingga total blokir Ditjen KSDAE menjadi sebesar Rp.103.385.766.000,-
- Pada bulan Februari 2024, telah dilakukan revisi Buka Blokir Kode 2 (HLN FP VI, BioCF-ISFL, dan Belanja Modal) sebesar Rp.19.522.321.000,-
- Pada bulan Maret 2024, telah dilakukan revisi Buka Blokir Program Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) sebesar Rp.8.314.723.000,-
- Pada bulan Mei 2024, telah dilakukan revisi penambahan anggaran (top up) sumber dana HLN Forest Programme III - Sulawesi sebesar Rp.3.903.471.000,-
- Pada bulan September 2024, telah dilakukan revisi Pemenuhan Kekurangan Belanja Operasional Tahap II lingkup Ditjen KSDAE dengan mekanisme relaksasi blokir AA sebesar Rp.75.548.772.000,- dan optimalisasi anggaran internal KSDAE sebesar Rp.37.970.109.000,-
- Pada bulan Oktober 2024, telah dilakukan revisi Pemenuhan Kekurangan Belanja Operasional Tahap III lingkup Ditjen KSDAE melalui mekanisme pergeseran anggaran antar Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian LHK sebesar Rp.23.650.000.000,-
- Pada bulan November 2024, telah dilakukan revisi pencantuman anggaran Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) Proyek CONSERVE dan IN-FLORES Semester I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.12.283.135.000,- pada DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE.
- Pada bulan Januari 2025, telah dilakukan revisi pencantuman anggaran Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) Proyek CONSERVE dan IN-FLORES Semester II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.22.593.467.000,- pada DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun anggaran 2024, pagu alokasi anggaran Ditjen KSDAE menjadi sebesar Rp1.836.300.181.000,-.

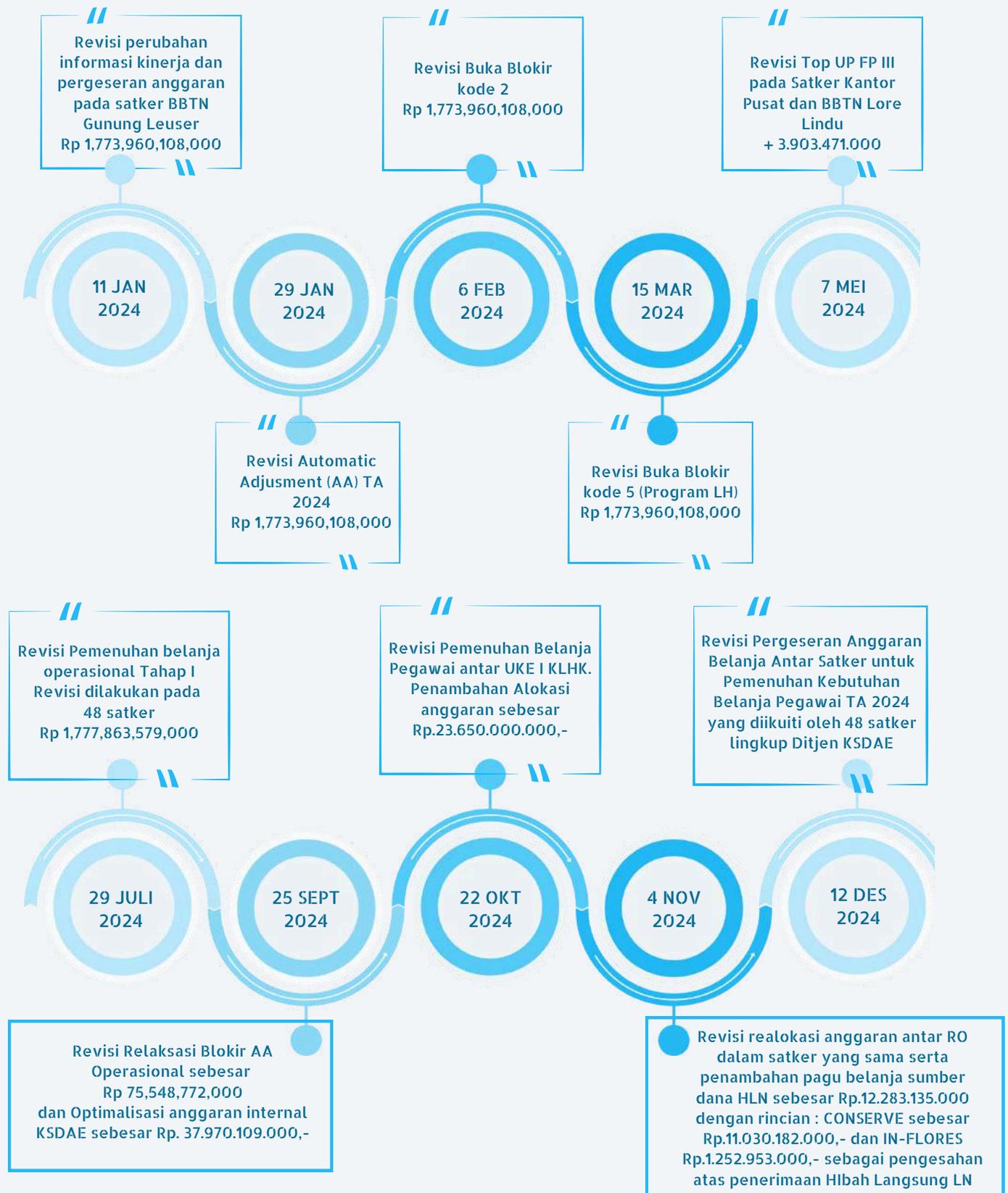
Berdasarkan hasil pemantauan pada system OMSPAN Tahun Anggaran 2024 per tanggal 30 Januari 2025 Ditjen KSDAE merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.803.726.268.575 atau 98,23% dari total pagu alokasi anggaran Rp1.836.300.181.000,-.

PERJALANAN PAGU ANGGARAN DITJEN KSDAE TAHUN 2024

PAGU AWAL Rp. 1,773,960,108,000

PAGU AKHIR Rp. 1,836,300,181,000

10 KALI REVISI



E. Pohon Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE

Pohon kinerja merupakan salah satu alat yang digunakan dalam sistem pengukuran kinerja strategis. Pohon kinerja menggambarkan sasaran yang akan dicapai dan indikator kinerja yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut. Pada Ditjen KSDAE, terdapat 6 sasaran strategis dan indikatornya yang digambarkan dalam pohon kinerja sebagai berikut:

DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat KSDAE	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Lestari dan Berkelanjutan
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen KSDAE	Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diferifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi secara Partisipatif	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran
Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien Lingkup Ditjen KSDAE	Meningkatnya Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi Kawasan Konservasi untuk Peningkatan Nilai Efektifitas	Terjaminnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi
Nilai SAKIP Ditjen KSDAE (Poin) Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE (Level) Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang Tertib dan Akuntabel (Dokumen)	Luas Kawasan Hutan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi secara Partisipatif (Juta Hektar) Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang Dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi (Unit KK)	Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Desa) Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi melalui Kemitraan Konservasi (Hektar)

DIREKTORAT JENDERAL KSDAE

	Jumlah Kerjasama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis pada Kawasan Konservasi (Dokumen)	Jumlah Kader Konservasi yang Dibina Melalui Upaya Bina Cinta Alam (Orang)	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya (Dokumen)
	Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Lestari dan Berkelanjutan	

	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari Hasil Penangkaran	

Terjaminnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya Inventarisasi dan Verifikasi Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati Didalam dan Diluar KK	Terjaminnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi	

Jumlah Kawasan Konservasi yang Dinilai Efektifitas Pengelolaannya (Unit KK)	Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi secara Partisipatif (Juta Hektar)	Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Desa)	
Luas Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi (Hektar)	Jumlah Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (Unit)	Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi melalui Kemitraan Konservasi (Hektar)	
Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Perlindungan Penanganan dan Pengendalian Kebakaran (Unit)	Jumlah Kerjasama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis pada Kawasan Konservasi (Dokumen)	Jumlah Kader Konservasi yang Dibina Melalui Upaya Bina Cinta Alam (Orang)	Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya (Dokumen)





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Program DITJEN KSDAE 2024
- B. Realisasi Anggaran DITJEN KSDAE 2024
- C. Nilai Kinerja Anggaran DITJEN KSDAE Tahun 2024
- D. Pemantauan Kegiatan Tematik DITJEN KSDAE 2024

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja DITJEN KSDAE tahun 2024 diukur melalui pelaksanaan 6 indikator kinerja program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK. Pada tahun 2024 rata-rata capaian IKP Ditjen KSDAE adalah sebesar 111,12%, dari 6 Indikator Kinerja Program terdapat 4 indikator yang capaiannya melebihi target yaitu 1) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif, 2) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, 3) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif di luar kawasan konservasi, dan 4) Nilai SAKIP Ditjen KSDAE. sedangkan 2 Indikator Kinerja Program yang tidak mencapai target yaitu 1) Nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan dan 2) Nilai PNBP dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL secara lestari.

Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja / %
Program Dukungan Manajemen		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	Target = 80 Poin Capaian = 82,31 poin 102,89 %
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Target = 19 Juta Ha Capaian = 26,80 Juta Ha 141,05 %
Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL yang lestari dan berkelanjutan	Nilai ekspor pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Target = Rp. 860 Miliar Capaian = Rp. 850 Miliar 99,97 %
Meningkatnya PNBP dari hasil pengelolaan jasa lingkungan KK dan pemanfaatan TSL secara lestari	Nilai PNBP dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL secara lestari	Target = Rp. 250 Miliar Capaian = Rp. 236 Miliar 94,40 %
Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Target = 725 Desa Capaian = 904 Desa 124,68 %

Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja / %
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif di luar kawasan konservasi	Target = 9.350.000 Ha Capaian = 9.353.269,34 Ha 106,45 %

Tabel xxx Capaian Indikator Kinerja Program tahun 2024 Ditjen KSDAE

1. IKP Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi secara Partisipatif Diluar Kawasan Konservasi



Kegiatan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi pada tingkat UPT berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di Luar KSA, KPA dan TB, dimana inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dilakukan pada 2 variabel yaitu variabel utama dan penunjang. Tiga variabel utama adalah tutupan lahan, ketersediaan air, dan tumbuhan dan satwa liar. Sedangkan variabel penunjang terdiri dari tipe ekosistem, keanekaragaman hayati, topografi, jenis tanah, stok karbon, dan variabel pendukung lainnya.

Target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja antara Ditjen KSDAE dan Menteri KLHK adalah 9,35 juta hektar, sedangkan sampai dengan akhir triwulan IV capaian untuk luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi seluas 9,95 juta hektar.

Tahun 2024 merupakan tahun ke 5 pelaksanaan kegiatan IKP Luas kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi, dimana untuk capaian Renstra terhadap target Renstra 2020-2024 seperti dibawah:

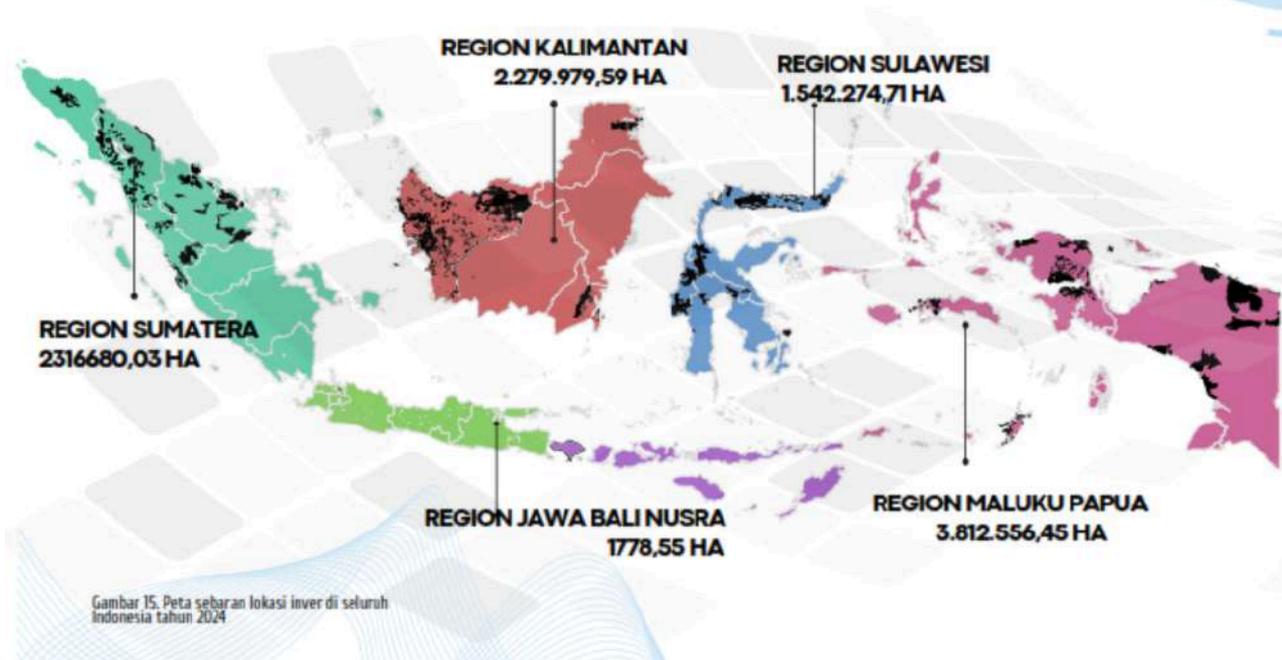
Tahun	Target Renstra	Realisasi	Persentase
2020	8.000.000	6.663.291,96	83,29%
2021	10.000.000	8.932.059,60	89,32%
2022	10.000.000	8.059.968,28	80,60%
2023	10.000.000	15.611.293,22	156,11%
2024	5.000.000	9.953.269,34	199,07%
Jumlah	43.000.000	49.219.882,40	114,46%

Tabel xxx Capaian terhadap target Renstra 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	9.350.000 Ha	9.953.269,34 Ha	106,4%

Tabel xxx Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kinerja 2024

PETA SEBARAN LOKASI INVER KEHATI DI LUAR KSA, KPA DAN TB TAHUN 2024



Gambar xxx Peta Sebaran Lokasi Inver Kehati di Luar KSA, KPA dan TB tahun 2024

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi pada tingkat UPT berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di Luar KSA, KPA dan TB, dimana inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dilakukan pada 2 variabel yaitu variabel utama dan penunjang. Tiga variabel utama adalah tutupan lahan, ketersediaan air, dan tumbuhan dan satwa liar. Sedangkan variabel penunjang terdiri dari tipe ekosistem, keanekaragaman hayati, topografi, jenis tanah, stok karbon, dan variabel pendukung lainnya.

No	UPT Penanggung Jawab	Capaian (Ha)
1	BKSDA Aceh	153.080,35
2	BBKSDA Sumatera Utara	799.801,95
3	BKSDA Sumatera Barat	372.340,90
4	BBKSDA Riau	991.456,83
5	BKSDA Kalimantan Selatan	252.121,91
6	BKSDA Kalimantan Tengah	678,92
7	BKSDA Kalimantan Timur	173.323,79
8	BKSDA Kalimantan Barat	1.853.854,97
9	BKSDA Jakarta	351,38
10	BBKSDA Sulawesi Selatan	513.351,00
11	BKSDA Sulawesi Tengah	436.630,05
12	BKSDA Sulawesi Tenggara	36.562,34
13	BKSDA Sulawesi Utara	555.731,33
14	BKSDA Bali	1.427,17
15	BKSDA Maluku	153.909,13
16	BBKSDA Papua	2.864.441,08
17	BBKSDA Papua Barat	794.206,24
TOTAL		9.953.269,34

Tabel xxx Capaian kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi berdasarkan UPT Pelaksana

2. IKP Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi secara Partisipatif



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memandatkan KLHK dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mempertahankan kawasan dengan nilai konservasi tinggi atau Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (ABKT), untuk mewujudkan hal tersebut KLHK menyusun Rencana Strategis 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020, yang menetapkan target mempertahankan 70 juta hektar sebagai areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Direktur Jenderal KSDAE menerbitkan Peraturan Nomor P.1/KSDAE/SET.3/Ren.2/1/2022 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET.3/Ren.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Strategis Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024 yang didalamnya ditetapkan kewajiban inventarisasi dan pencatatan spesies penting ekosistem di Indonesia. Kawasan dengan nilai konservasi tinggi seluas 70 Juta Hektar dimana 27 Juta Hektar berada didalam kawasan konservasi dan 43 Juta Hektar berada diluar kawasan konservasi.

Direktorat KKHSG secara scientific based menggunakan referensi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi yang didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki kekayaan spesies, khususnya pada satwa liar,

dengan kriteria nilai endemisitas, status perlindungan nasional, dan status keterancamannya berdasarkan IUCN Red List dengan kategori *critically endangered*, *endangered* dan *vulnerable*. Salah satu *verifier* pencapaian indikator tersebut adalah laporan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati tinggi yang mencakup daftar dan peta sebaran spesies baik didalam maupun diluar kawasan konservasi.

Analisa data dilakukan menggunakan pendekatan Pemodelan Distribusi Spesies (Species Distribution Model/SDM). Pada prosesnya cakupan wilayah yang dianalisa dan dipetakan adalah seluruh wilayah daratan (terrestrial) di Indonesia pada skala ekoregion yang mengacu pada Keputusan Menteri LHK Nomor SK.8/MenLHK/Setjen/ PLA.3/1/2018. Data yang diolah bersumber dari perjumpaan tumbuhan dan satwa liar (TSL) kegiatan inventarisasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh UPT Ditjen KSDAE baik Balai Besar/Balai Taman Nasional maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta mitra kerja yang terkumpul dalam platform SIDAK KSDAE dan SMART Tools. Dalam konteks kegiatan inventarisasi TSL, data ini dimaknai sebagai sampling plot sebagai dasar dalam menganalisa dan mengekstrapolasi potensi dan sebaran habitat pada wilayah yang lebih luas.

Target capaian luasan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif tahun 2024 adalah 19 Juta Hektar. Berdasarkan hasil rekapitulasi data, realisasi pelaksanaan luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif terealisasi pada areal seluas 26,80 Juta Hektar atau sebesar 141%..

Tahun	Target Renstra	Realisasi	Persentase
2020	3.343.114	13.590.505,91	406,52%
2021	7.300.000	10.655955,99	145,97%
2022	10.410.368	12.203.261,61	117,22%
2023	12.000.000	13.020.000	108,50%
2024	19.000.000	26.800.000	141%
Jumlah	43.000.000	49.219.882,40	114,46%

Tabel xxx Capaian terhadap target Renstra 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif	19.000.000 Ha	26.800.000 Ha	141%

Tabel xxx Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kinerja 2024

3. IKP Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Lestari dan Berkelanjutan



Nilai ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) terutama dari hasil penangkaran adalah nilai seluruh spesimen TSL yang diperdagangkan ke luar negeri dari hasil penangkaran yang ditentukan oleh permintaan luar negeri. Penghitungan nilai ekspor dilakukan dengan 3 metode sebagai berikut:

- 1.Rekapitulasi nilai Data Perdagangan (Data Penyerahan) dan Data Transaksi Ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Pabean (Ditjen Bea Cukai). Nilai ekspor yang diinput yaitu nilai yang tertera pada data transaksi Free on Board (FOB) dan atau Cost and Freight (CFR).
- 2.Rekapitulasi nilai Data perdagangan pada Invoice yang dilaporkan oleh perusahaan (eksportir).
- 3.Rekapitulasi dari realisasi jumlah unit spesimen yang diekspor dikalikan perkiraan harga pasar internasional untuk jenis spesimen dimaksud.

Metode ini dilakukan apabila eksportir belum melaporkan transaksi ekspornya baik dalam bentuk rekapitulasi dokumen. PEB maupun rekapitulasi invoice.

Kontribusi bidang pemanfaatan TSL terhadap sasaran program dan indikator kinerja sebesar Rp 859.721.927.511,- dari target tahun 2024 sebesar Rp. 860 Miliar atau sebesar 98,53%.

Capaian nilai ekspor TSL selama tahun 2020-2024 berkomulatif dengan target dan realisasi nilai ekspor sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	2.000.000.000.000	4.884.530.666.059	244,23%
2021	2.050.000.000.000	4.200.486.206.131	204,90%
2022	2.100.000.000.000	1.743.418.485.011	83,02%
2023	2.150.000.000.000	1.731.937.260.001	80,56%
2024	860.000.000.000	859.721.927.511	98,53%
Jumlah	9.150.000.000.000	13.420.094.544.713	146,67%

Tabel xxx Capaian terhadap target Renstra 2020-2024

Apabila dilihat dari capaian nilai ekspor TSL selama 5 tahun terakhir, capaian nilai ekspor ini telah tercapai melebihi target renstra yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh tingginya nilai ekspor TSL pada tahun 2020-2021 yang mencapai lebih 200 % dari target. Sonokeling menjadi penyumbang nilai ekspor TSL sejak tahun 2020, yaitu sejak sonokeling masuk dalam appendix CITES (Appendix II).

Pada tahun 2024 capaian nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari hasil penangkaran sebesar Rp 859.721.927.511 dari target sebesar Rp. 860.000.000.000 atau sekitar 98,53%. Kontribusi nilai ekspor hasil penangkaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Taksa (Hasil Penangkaran)	Nilai Ekspor Tahun 2023	Nilai Ekspor Tahun 2024
1	Tumbuhan	1,116,620,521,498	787,237,183,998
2	Burung	458,142,000,000	31,175,150,000
3	Coral	100,555,175,000	2.012.180.000
4	Mamalia	43,540,500,000	166.500.000
5	Reptil	20,319,200,000	37,128,325.000
6	Ikan	2,100,000,000	0
7	Arthropoda	1,734,588,513	1,839,838,513
8	Mollusca	406,500,000	162,750,000
TOTAL		1,743,418,485,011	859,721,927,511

Tabel xxx Capaian nilai ekspor TSL yang berasal dari hasil penangkaran

Pada tabel diatas taksa yang mendukung capaian untuk nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran pada tahun 2024 antara lain dari taksa reptil dari ekspor reptile hidup, kulit buaya muara (*Crocodilus porosus*) serta daging reptile. Untuk taksa arthropoda berasal dari ekspor penangkaran jenis kupu kupu.

Penurunan nilai ekspor pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terjadi pada taksa tumbuhan, koral, mamalia, dan burung. Penurunan nilai ekspor ini terjadi karena berkurangnya ekspor dari jenis yang masuk ke dalam taksa tersebut. Untuk mamalia, ekspor dari primata dari jenis monyet ekor panjang tidak ada dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, ekspor untuk taksa tumbuhan hanya berasal dari ekspor sonokeling (*Dalbergia latifolia*) dan anggrek yang nilainya mengalami penurunan. Sementara pada tahun 2023, ekspor dari taksa tumbuhan tidak hanya dari sonokeling dan anggrek tapi juga dari akar laka dan pasak bumi serta pakis.

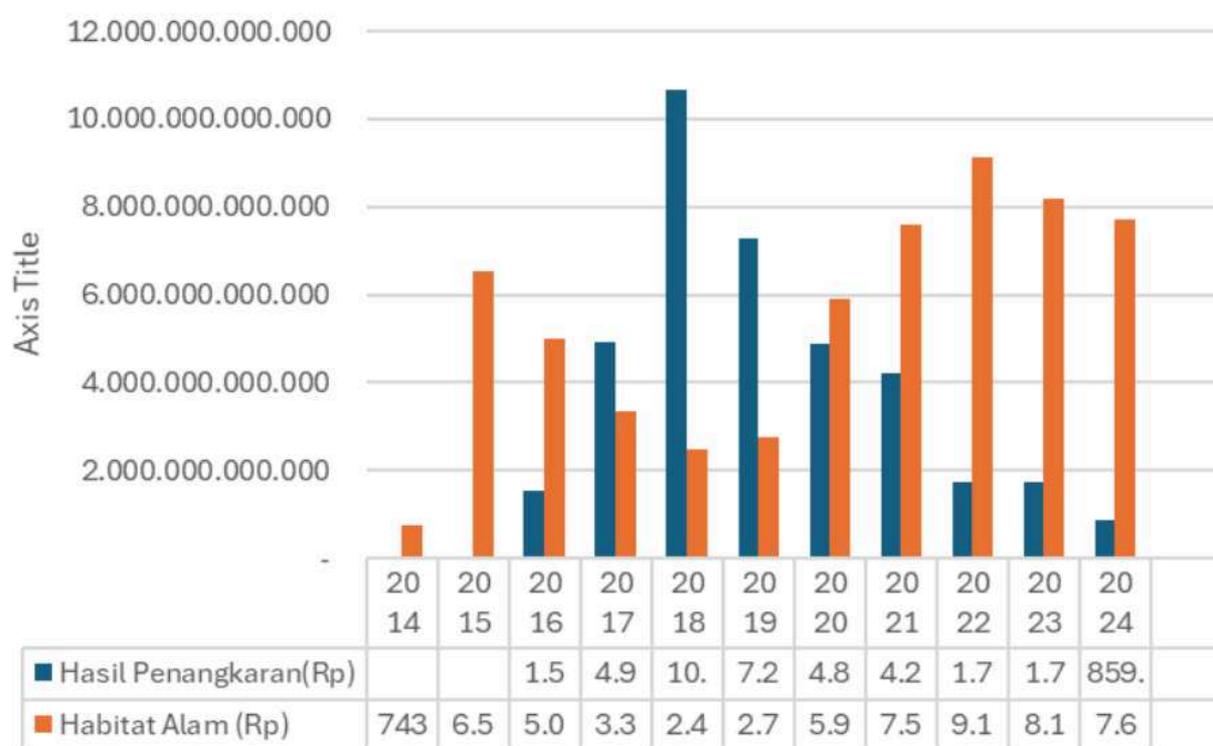
Selain itu juga, ekspor koral hasil budidaya juga mengalami penurunan karena hasil audit kelayakan penangkaran yang menghasilkan rekomendasi batas maksimal pemanfaatan hasil penangkaran baru dilakukan pada tahun 2024. Sementara itu untuk jenis ikan sudah dialihkan pengelolaannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Kesepakatan bersama antara Kementerian LHK dan KKP nomor PKS.1/MENLHK/SETJEN/KSA.2/3/2023 dan Nomor 02/MEN-KP/KB/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.

Secara umum, penurunan capaian target nilai ekspor TSL tahunan dari 2024 disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Realisasi ekspor tumbuhan dan satwa liar pada tahun 2024 pada beberapa taksa mengalami penurunan antara lain disebabkan karena pasar internasional yang masih sepi sehingga permintaan berkurang.
2. Prosedur masuk untuk impor barang ke beberapa negara khususnya di Cina membutuhkan waktu yang panjang sebelum barang tersebut bisa diekspor.
3. Terdapat jenis TSL yang masuk ke dalam Review Significant Trade CITES seperti monyet ekor Panjang hasil penangkaran sehingga jumlah kuota ekspor nya diturunkan atau tidak melakukan ekspor karena tidak ada permintaan.
4. Beberapa perusahaan eksportir masih terkendala proses perpanjangan ijin sebagai pengedar luar negeri di sistem OSS baik proses mendapatkan dokumen persetujuan lingkungan maupun proses notifikasi persetujuan dari akun penyetuju OSS KLHK yaitu Biro Hukum.
5. Pengalihan jenis pisces untuk dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Masih banyak perusahaan eksportir yang melakukan perdagangan ke luar negeri menggunakan sumber perolehan dari alam dibandingkan hasil penangkaran.

Perdagangan TSL ke luar negeri (ekspor) tidak hanya bersumber dari hasil penangkaran, akan tetapi bisa dilakukan untuk jenis TSL yang berasal dari habitat alam yang dimanfaatkan berdasarkan kuota pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal KSDAE di setiap awal tahun.

Penetapan tersebut berdasarkan rekomendasi otoritas ilmiah dari kriteria yang ditetapkan oleh Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati BRIN. Besaran nilai ekspor TSL jika digabung dengan sumber yang berasal dari alam pada tahun 2024 sebesar Rp. 7,6 Milyar sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.



Gambar xxx Grafik nilai ekspor TSL berdasarkan dari hasil penangkaran dan habitat alam

4. IKP Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari



PNBP merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Jenis dan besaran PNBP yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal KSDAE diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Jenis PNBP yang dihasilkan dari Direktorat Jenderal KSDAE bersumber dari pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan dari habitat alam; pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis asli Indonesia, serta pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pada tahun 2024 nilai PNBP Ditjen KSDAE mencapai angka Rp. 236.381.539.395 atau sebesar 94,4% dari target di tahun 2024 sebesar 250 Milyar rupiah. Nilai PNBP pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL tahun 2020-2024 seperti tabel dibawah:

No	Tahun	Nilai PNBP
1	2020	8.351.647.457
2	2021	75.286.049.253
3	2022	129.731.944.043
4	2023	185.748.331.359
5	2024	236.381.539.395
Total		705.499.511.507

Tabel xxx Nilai PNBP pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL tahun 2020-2024

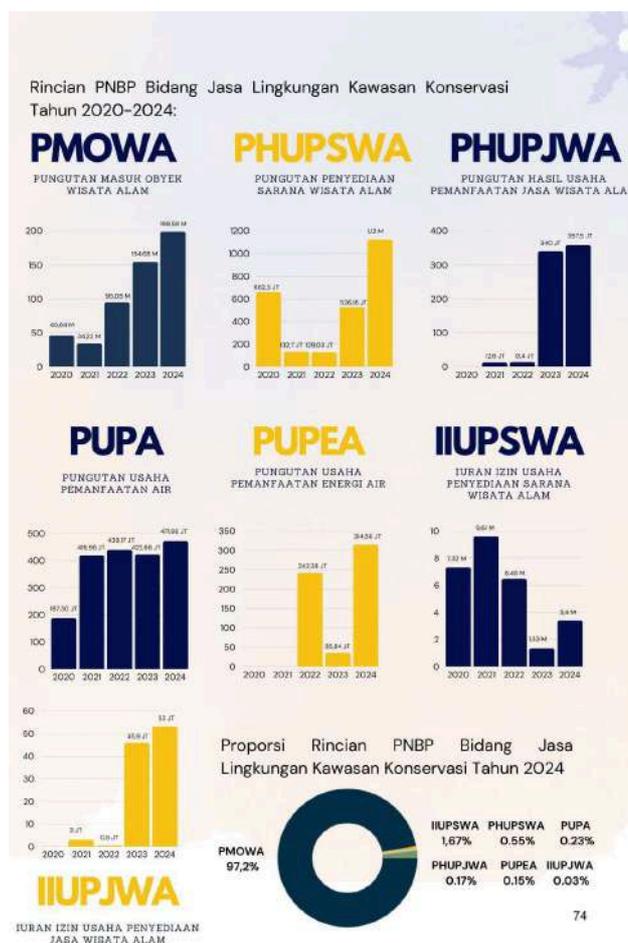
PNBP bidang Jasa Lingkungan tahun 2024 telah tercapai RP. 204.295.974.080 Melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan pelestarian alam. Kegiatan dilaksanakan pada 5 Desember 2024, yang dihadiri oleh UPT/UPTD yang memiliki potensi panas bumi pada wilayah kerjanya, pemegang IPJLPB eksisting, serta calon pemohon PB-PJLPB.

Narasumber dalam kegiatan yaitu dari Direktorat PJLKK, Ditjen EBTk Kementerian ESDM, dan Star Energy Geothermal Darajad II, Ltd.

Jenis PNBp bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Pelestarian Alam dalam PP No 36 tahun 2024 yaitu:

1. Iuran PB-PJLPB pada Kawasan Konservasi (TN/TWA/Tahura);
2. Pungutan atas kegiatan PB-PJLPB pada kawasan konservasi;
3. Pungutan atas Kegiatan Survei Panas Bumi pada KK (TN/TWA/Tahura) atau Penelitian Jasling Lainnya pada KK (TN/TWA/Taman Baru) dengan Tujuan Komersial;
4. Pungutan atas Kegiatan Pengambilan dan Pengangkutan Sampel Survei Panas Bumi pada KK (TN/TWA/Tahura)/Kegiatan Pengambilan Sampel Penelitian Lainnya (selain Tumbuhan dan Satwa Liar) pada KK (TN/TWA/TB) dengan Tujuan Komersial meliputi: sampel Cair/ padat berupa batuan/padat berupa tanah/gas;
5. Denda atas Setiap Keterlambatan Penyampaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi: Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Rencana Pengusahaan Lima Tahun Kedua dan Seterusnya/RKT/Laporan Tahunan/Laporan Semester).

Pada tahun 2024, total jumlah kunjungan pengunjung ke kawasan konservasi sebanyak 6.591.289 orang. Jumlah kunjungan tersebut terdiri dari 5.963.585 orang wisatawan dalam negeri (nusantara) dan 627.604 orang wisatawan luar negeri (mancanegara).



Gambar xxx Rincian PNBp Bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun 2020-2024

Jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan TSL sebesar Rp. 20 Milyar. Nilai tersebut merupakan rekapitulasi PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL di Dalam Negeri atau Luar Negeri, dengan detail komponen sebagai berikut:

1. Iuran perizinan pemanfaatan TSL
2. Pungutan pengambilan/penangkapan TSL dari habitat alam
3. Pungutan perdagangan spesimen TSL (alam dan penangkaran)
4. Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS-LN)
5. Denda administrasi pelanggaran peredaran TSL

Adapun capaian Jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan TSL Tahun 2024 berdasarkan jenis pemanfaatan TSL (Luar Negeri atau Ekspor dan Dalam Negeri) yaitu sebesar Rp. 25.961.603.432 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian PNBP	Jumlah (Rp)
1	Direkotrat KKHSG (Pemanfaatan TSL Luar Negeri)	15.437.631.271
2	UPT BBKSDA/BKSDA (Pemanfaatan TSL Dalam Negeri)	10.523.972.161
JUMLAH		25.961.603.432

Tabel xxx Capaian jumlah nilai PNBP dari pemanfaatan TSL Tahun 2024 berdasarkan jenis pemanfaatan TSL (Luar Negeri atau Ekspor dan Dalam Negeri)

Penurunan penerimaan PNBPN tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 1.591.634.899 atau 6% dari Rp. 27.553.238.331. Penurunan PNBPN dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan negara bukan pajak di UPT BBKSDA/BKSDA yang cukup signifikan. Sumber penerimaan PNBPN di UPT dari kegiatan pemanfaatan TSL diperoleh dari Iuran Perijinan Pemanfaatan TSL dalam negeri, Pungutan Pengambilan/Penangkapan TSL dari alam, dan Pungutan Blanko Administrasi peredaran TSL dalam negeri (SATS DN).

Dengan terbitnya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu Yang Termasuk Dalam Appendiks CITES serta Surat Edaran Dirjen PHL Nomor SE.4/PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 tentang Deklarasi Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Masuk Appendiks CITES yang menjelaskan bahwa pengangkutan kayu yang termasuk appendiks CITES setelah tanggal 22 Agustus 2022 menggunakan Surat Angkut Kayu Rakyat sebagai dokumen hasil hutan kayu appendiks CITES menggantikan SATS DN.

Hal ini yang menyebabkan beberapa UPT KSDA yang selama ini menerbitkan dokumen SATS DN kehilangan PNBPN dari pungutan blanko administrasi SATS DN. Selain itu dimungkinkan penurunan PNBPN disebabkan dari jumlah pelaku usaha dalam negeri yang izinnnya habis dan terkendala di sistem OSS sehingga kegiatan perdagangan dalam negeri serta pengambilan/penangkapan TSL dari alam tidak optimal. Berikut gambaran terkait capaian PNBPN Pemanfaatan TSL di UPT BBKSDA/BKSDA pada tahun 2023 dan tahun 2024:

No	Unit Kerja	PNBPN Tahun 2023 (Rp)	PNBPN Tahun 2024 (Rp)
1	Direktorat KKHSG	15,171,587,497	15,473,631,271
2	BBKSDA Sumut	414,183,800	366,721,250
3	BBKSDA Riau	267,915,875	85,612,000
4	BBKSDA Jabar	1,256,166,499	576,247,270
5	BBKSDA Jatim	1,711,739,978	1,352,348,167
6	BBKSDA NTT	132,928,700	125,906,450
7	BBKSDA Sulsel	559,558,234	328,830,742
8	BBKSDA Papua	3,502,478,375	3,277,763,549

No	Unit Kerja	PNBP Tahun 2023 (Rp)	PNBP Tahun 2024 (Rp)
9	BKSDA Papua Barat	325,962,550	282,714,200
10	BKSDA NAD	74,747,300	165,979,375
11	BKSDA Sumbar	248,033,625	116,083,350
12	BKSDA Jambi	68,476,840	132,887,500
13	BKSDA Sumsel	1,048,710,208	845,127,990
14	BKSDA Bengkulu	127,538,332	244,455,665
15	BKSDA Jakarta	64,231,200	91,895,000
16	BKSDA Jawa Tengah	217,059,880	106,995,150
17	BKSDA Yogyakarta	68,850,130	39,975,475
18	BKSDA Bali	18,603,000	64,784,700
19	BKSDA NTB	30,755,059	36,817,526
20	BKSDA Kalbar	305,573,400	424,385,480
21	BKSDA Kalteng	699,306,025	718,659,200
22	BKSDA Kalsel	94,679,000	87,795,600
23	BKSDA Kaltim	177,759,150	139,671,900
24	BKSDA Sulteng	145,418,681	100,427,906
25	BKSDA Sultra	137,046,268	136,280,196
26	BKSDA Sulut	187,231,000	136,616,000
27	BKSDA Maluku	485,148,365	538,990,520

Tabel xxx Capaian PNBP Pemanfaatan TSL di UPT BKSDA/BKSDA pada tahun 2023 dan tahun 2024

5. IKP Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Akses Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif



Capaian pada IKP ini sebanyak 895 desa dari target capaian di tahun 2024 sebanyak 725 desa atau sebesar 123,4%, data ini bersumber dari Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas kelompok, fasilitasi kelompok kemitraan konservasi dan pemberian bantuan usaha kelompok masyarakat.

Capaian IKP ini mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2020-2024. Data capaian 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah Desa per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi	515	469	541	48	485
Pemberian akses Pemanfaatan Tradisional	67	130	71	9	45
Peningkatan Usaha Kemitraan Konservasi	-	-	-	36	337
Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka ekowisata (wisata alam, SAVE, dan bahari)	-	-	-	25	55
Jumlah	582	599	612	879	895

Tabel xxx Capaian IKP Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Paradigma pengelolaan kawasan konservasi saat ini menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi melalui kerangka pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Salah satu proses penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Hal ini sejalan dengan salah satu pencapaian Indikator Kinerja “Jumlah Desa di Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat”. Pendampingan dalam rangka pemberdayaan dilakukan melalui banyak hal diantaranya melalui kesepakatan konservasi, pemberian akses pemanfaatan tradisional, peningkatan unit usaha kelompok masyarakat, serta pemberian pendampingan dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Kesepakatan konservasi antara Kepala UPT dengan Kepala Desa sekitar kawasan konservasi menjadi salah satu indikator adanya proses pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Seluruh kegiatan pemberdayaan dimaksud tentu saja memerlukan kerjasama dari tingkat pusat hingga tapak (UPT).

Kegiatan pendampingan masyarakat oleh UPT Lingkup KSDAE dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini diantaranya dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam bentuk penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat, fasilitasi kesepakatan konservasi, pembentukan kelompok binaan, dan penyusunan rencana kelompok,
2. Pendampingan masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam bentuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan peningkatan kapasitas untuk pendamping kelompok.
3. Pengembangan ekonomi kelompok masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan modal, memberikan peningkatan kapasitas untuk kelompok dampingan, studi banding, dan sebagainya.

Pemberian Apresiasi Kelompok Binaan UPT Lingkup Ditjen KSDAE dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA. Apresiasi diberikan kepada Kelompok Binaan yang dinilai telah melakukan kegiatan yang menunjang kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dalam bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Kelompok-kelompok tersebut juga telah mempunyai dokumen kesepakatan konservasi dengan UPT pembinanya serta telah memiliki usaha ekonomi yang cukup membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain kepada kelompok binaan, apresiasi juga diberikan untuk para pendamping kelompok tersebut atas usahanya dalam membina kelompok hingga mencapai kondisi saat ini.

Pada tahun 2024 ini apresiasi diserahkan pada Puncak Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Boyolali dan diberikan kepada 3 (tiga) kelompok binaan sebagai berikut:



Gambar xxx Pemberian Apresiasi Kelompok Binaan UPT Lingkup Ditjen KSDAE pada puncak acara HKAN 2024 di Boyolali

- **Kelompok Masyarakat Rumah Literasi Hijau - Binaan Balai TN Kepulauan Seribu**

Kelompok ini berada di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Pendamping kelompok ini adalah Devi Alamsyah S.Hut dan Kus Indrayanti, A.Md (fungsional BTN Kepulauan Seribu). Rumah Literasi Hijau melakukan aksi kepedulian terhadap lingkungan dan konservasi dalam kegiatan pengolahan sampah menjadi kegiatan eduekwisata serta penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang di wilayah TN Kepulauan Seribu. Kelompok Rumah Literasi Hijau mampu berkembang dan menyebarkan gagasan pelestarian alam kepada masyarakat luas dengan berbagai cara dan pola, dengan tujuan bumi ini tetap terjaga dan lestari serta masyarakatnya sejahtera.



Pokmas Rumah Literasi Hijau

Kelompok binaan Taman Nasional Kepulauan Seribu bergerak pada kegiatan budaya konservasi dan edukasi lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat.

Poto: kolaborasi dengan berbagai pihak dari Ibu Rumah Tangga, Anak-anak, Kepala Rumah Tangga, Komunitas, Akademisi, Swasta, hingga Pemerintah dalam upaya merealisasikan Gerakan Pulauku Nol Sampah



Gambar xxx Kegiatan eduekwisata yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Rumah Literasi Hijau - Binaan Balai TN Kepulauan Seribu

- **Kelompok Masyarakat KTH Labongke - Binaan Balai TN Bantimurung Bulusaraung**

Kelompok ini berada di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendamping kelompok ini adalah Syafyuddin, S.Hut dan Muh. Darwis (staf pada BTN Bantimurung Bulusaraung). Kelompok ini telah berkontribusi dalam pelestarian kawasan TN Bantimurung Bulusaraung melalui upaya pemanfaatan secara berkelanjutan sehingga dapat turut meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar TN Bantimurung Bulusaraung sebesar 200% dengan tetap menjaga kelestarian kawasan.

Pokmas KTH Labongke

Kelompok binaan Taman Nasional Bantimurung Bullusaraung Kelompok tani hutan labongke terbentuk pada tahun 2018 dan beranggotakan 21 orang.

Poto: Kelompok ini bergerak di Bidang Usaha Kopi dan Getah Pinus dan berhasil mengembangkan serta memasarkan produk kopi olahan dalam bentuk Green Beans, Roasted Beans dan Kopi Bubuk dengan Branding Kopi Labongke



Gambar xxx Kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat KTH Labongke - Binaan Balai TN Bantimurung Bulusaraung

• Kelompok Masyarakat LPKD Singgani - Binaan Balai Besar TN Lore Lindu

Kelompok ini berada di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pendamping kelompok ini adalah Agave Deo, S.Hut, Birgitta Karlina Pritta, S.Hut dan Irfandi, S.Si. Upaya konservasi Maleo, satwa endemik Sulawesi, di Desa Pakuli Utara telah dilakukan sejak tahun 2018 oleh Kelompok Singgani dan telah memberikan dampak positif bagi populasi Maleo, kelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Pakuli Utara. Selain itu Kelompok Singgani juga mengelola kegiatan ekowisata berbasis konservasi yaitu wisata edukasi maleo, pengamatan satwa, river tubing dan camping ground untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pakuli Utara khususnya anggota LPKD Singgani.



Pokmas LPKD Singgani

Kelompok binaan Taman Nasional Lore Lindu bergerak pada kegiatan ekowisata berbasis konservasi yaitu wisata edukasi maleo, pengamatan satwa river tubing dan camping ground untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pakuli Utara.

Poto: Pelestarian hewan maleo sebagai satwa endemik Sulawesi dan Kegiatan River Tubing



Gambar xxx Kegiatan ekowisata yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat LPKD Singgani - Binaan Balai Besar TN Lore Lindu

6. IKP Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE



SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

Evaluasi AKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP tingkat Eselon I dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KLHK, terhadap 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.

Pada bulan Maret 2024 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE terhadap 4 komponen akuntabilitas kinerja. Implementasi atas SAKIP tahun 2023 dilakukan penilaian pada tahun 2024. Penilaian SAKIP tersebut dilakukan pada tingkat Eselon I Ditjen KSDAE melalui aplikasi E SAKIP KLHK. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi tim Inspektorat Jenderal Kementerian LHK secara keseluruhan nilai atas implementasi SAKIP Ditjen KSDAE yaitu 82,31 dengan nilai A (Memuaskan). Apabila dibandingkan dengan target nilai SAKIP berdasarkan PK Ditjen KSDAE tahun 2024 (80 Poin), maka capaian kerjanya adalah sebesar 102,89 Poin.

No	Komponen Akuntabilitas	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,48
2	Pengukuran Kinerja	30	24,09
3	Pelaporan Kinerja	15	12,18
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,56
Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP		100	82,31

Tabel xxx Hasil evaluasi penilaian SAKIP tahun 2024

Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE selama 5 tahun terakhir mempunyai nilai yang berfluktuatif yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	78	79,37	101,75%
2	2021	78,5	80,02	101,93%
3	2022	79	79,12	100,15%
4	2023	79,5	29,88	100,57%
5	2024	80	82,31	102,89%

Tabel xxx Nilai SAKIP DITJEN KSDAE 5 tahun terakhir

Hal-hal yang mempengaruhi penilaian atas implementasi SAKIP yaitu:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan serta menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK terhadap SAKIP Ditjen KSDAE yang tertuang dalam Surat Nomor: SP.66/ITJEN/ITWIL.1/RHS/WAS.2.1/4/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah:

1. Melampirkan bukti rapat/pembahasan/evaluasi kinerja dan/atau bila diperlukan adanya perubahan target dan penyesuaian tergetnya (PK Revisi dan/atau DIPA revisi);
2. Melampirkan hasil kuesioner atas capaian kinerja organisasi dan/atau capaian sasaran kinerja pegawai
3. Melengkapi dokumen-dokumen keterlibatan pimpinan dalam kegiatan rapat pembahasan yang dilakukan secara berkala, antara lain: surat undangan, dokumentasi, notulensi, dan daftar hadir;
4. Menyajikan hasil evaluasi kinerja yang dibandingkan dengan target IKU, IKP, IKK secara berjenjang atas realisasi kinerja berjenjang;
5. Menyajikan kesimpulan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target yang diinginkan, sehingga menjawab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja secara berjenjang;
6. Melengkapi bukti dukung terkait perhitungan tunjangan kinerja pegawai per bulan ditentukan atas kinerja pegawai tersebut (ketetapan kehadiran dan penyampaian laporan kinerja hariannya), dibuktikan dengan lembar tunjangan kinerja individu pada aplikasi SIKADIR;
7. Menyajikan dokumen analisis/perbaikan peta jabatan yang disusun berdasarkan target kinerja dan kompetensi pada jabatan tersebut;
8. Menyajikan dokumen rapat pembahasan perubahan strategi dan kebijakan/penyesuaian dokumen PK/Renja;
9. Menyajikan dasar revisi anggaran yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja dan realokasi anggaran;
10. Menyajikan google form kuesioner terkait dengan kinerja masing-masing unit kerja dan individu;
11. Menetapkan benchmarking capaian kinerja dan perbandingannya dengan kinerja unit lain.

Tindak lanjut dari hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal KLHK terhadap SAKIP Ditjen KSDAE adalah:

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan penyusunan Laporan Kinerja yang membahas mengenai capaian kinerja dan cara pengukuran kinerjanya, dihadiri oleh peserta lingkup Eselon II Pusat Ditjen KSDAE, yang dihadiri oleh para pimpinan. Undangan Rapat Plh Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nomor UN.15/Set.3/PEHKT/Ren.2/1/2024 tanggal 17 Januari 2023 Perihal Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen KSDAE 2023 dan notulensi.
2. Telah dibuat Bahan Rapat Koordinasi Evaluasi Ditjen KSDAE tahun 2023 yang telah memuat mengenai evaluasi kinerja terhadap target pencapaian, sebagaimana Bahan Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2023.
3. Telah dibuat Bahan Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE tahun 2023 yang telah memuat mengenai evaluasi kinerja terhadap target pencapaian
4. Telah tersedia bukti dukung terkait perhitungan tunjangan kerja setiap pegawai Ditjen KSDAE per bulannya yang telah disesuaikan dengan kinerja pegawai dalam aplikasi Sikadir KLHK
5. Telah dilaksanakan analisis perbaikan peta jabatan yang disusun berdasarkan kompetensi peta jabatan lingkup Ditjen KSDAE
6. Telah dilaksanakan rapat dengan pembahasan revisi penambahan anggaran PNBP Ditjen KSDAE 2023
7. Telah ada Surat mengenai Konfirmasi Target dan Alokasi Anggaran Kementerian LHK TA 2023 dan revisi Perjanjian Kinerja Ditjen KSDAE 2023, berdasarkan Surat Plt Kepala Biro Perencanaan Nomor S.419/Rocan/RPA/RM/Ren.2/11/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Permohonan Masukan Rancangan Matriks Revisi Renja, Konfirmasi Target dan Alokasi Anggaran Kementerian LHK TA 2023
8. Telah dilaksanakan pengambilan data terkait evaluasi kinerja dan perencanaan melalui Kuesioner Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Ditjen KSDAE 2023 (Data dukung: hasil kuesioner)
9. Telah melakukan perbaikan berupa penambahan Benchmarking yang termasuk dalam pembahasan Laporan Kinerja Ditjen KSDAE 2023

B. REALISASI ANGGARAN

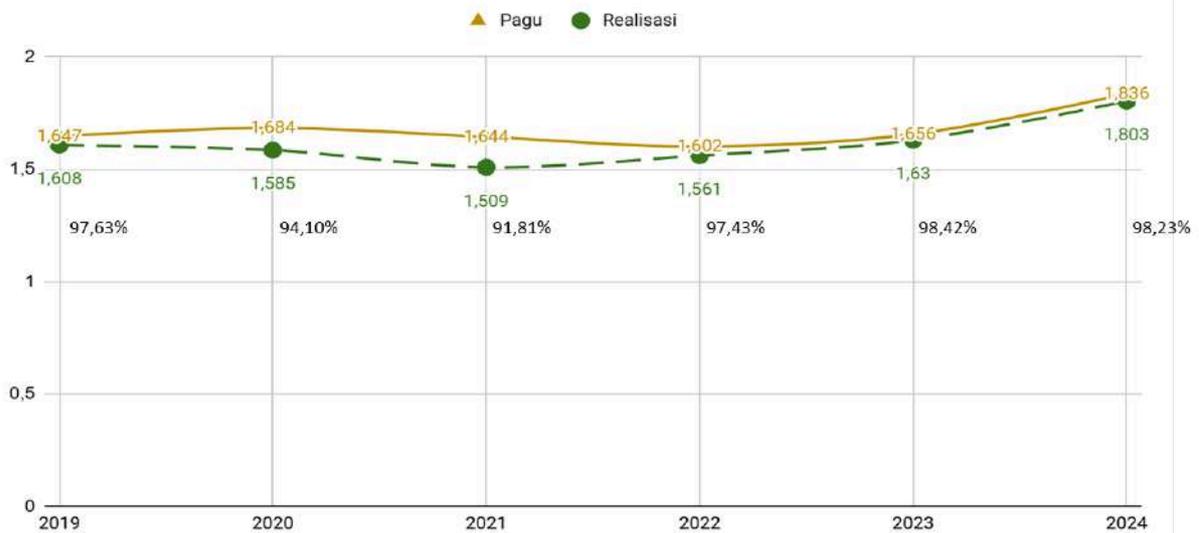


Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem pada awal tahun 2024 Ditjen KSDAE mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.773.960.108.000,- dengan adanya berbagai kebijakan dan kebutuhan terdapat beberapa perubahan pagu alokasi anggaran Ditjen KSDAE, yaitu:

1. Pada bulan Januari 2024, telah dilakukan revisi Blokir Automatic Adjustment (AA), sehingga total blokir Ditjen KSDAE menjadi sebesar Rp.103.385.766.000,-
2. Pada bulan Februari 2024, telah dilakukan revisi Buka Blokir Kode 2 (HLN FP VI, BioCF-ISFL, dan Belanja Modal) sebesar Rp.19.522.321.000,-
3. Pada bulan Maret 2024, telah dilakukan revisi Buka Blokir Program Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) sebesar Rp.8.314.723.000,-
4. Pada bulan Mei 2024, telah dilakukan revisi penambahan anggaran (top up) sumber dana HLN Forest Programme III – Sulawesi sebesar Rp.3.903.471.000,-
5. Pada bulan September 2024, telah dilakukan revisi Pemenuhan Kekurangan Belanja Operasional Tahap II lingkup Ditjen KSDAE dengan mekanisme relaksasi blokir AA sebesar Rp.75.548.772.000,- dan optimalisasi anggaran internal KSDAE sebesar Rp.37.970.109.000,-
6. Pada bulan Oktober 2024, telah dilakukan revisi Pemenuhan Kekurangan Belanja Operasional Tahap III lingkup Ditjen KSDAE melalui mekanisme pergeseran anggaran antar Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian LHK sebesar Rp.23.650.000.000,-
7. Pada bulan November 2024, telah dilakukan revisi pencantuman anggaran Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) Proyek CONSERVE dan IN-FLORES Semester I Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.12.283.135.000,- pada DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE.
8. Pada bulan Januari 2025, telah dilakukan revisi pencantuman anggaran Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) Proyek CONSERVE dan IN-FLORES Semester II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.22.593.467.000,- pada DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE.

Dengan berbagai perubahan tersebut, pada akhir tahun anggaran 2024, pagu alokasi anggaran Ditjen KSDAE menjadi sebesar Rp1.836.300.181.000,-.

Berdasarkan hasil pemantauan pada system OMSPAN Tahun Anggaran 2024 per tanggal 30 Januari 2025 Ditjen KSDAE merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.803.726.268.575 atau 98,23% dari total pagu alokasi anggaran Rp1.836.300.181.000,-.



Gambar xxx Grafik perbandingan pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2024 Ditjen KSDAE

Pagu Anggaran Ditjen KSDAE sebesar Rp. 1.813.706.714.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.803.726.268.575 atau 98,23% (Data OM-SPAN Tahun Anggaran 2024 per 30 Januari 2025). Berdasarkan realisasi anggaran tersebut, Ditjen KSDAE menempati peringkat 1 dari 13 Eselon I + BRGM, di atas realisasi KLHK yang mencapai 91,69%. Satker dengan realisasi anggaran tertinggi adalah BTN Wakatobi sebesar 99,98%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 0,19% (realisasi periode sebelumnya sebesar 98,42%). Berikut adalah pagu dan realisasi anggaran per satuan kerja Ditjen KSDAE dalam penyerapan anggaran 10 besar.

Pagu dan Realisasi Anggaran Per Satker Ditjen KSDAE (dalam Miliar Rupiah)



Realisasi berdasarkan jenis belanja yang mendapatkan alokasi pagu anggaran terbesar adalah belanja pegawai sebesar Rp. 946.866.842.000,- alokasi ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, dukungan manajemen, serta layanan sarana prasarana internal pada 75 satuan kerja lingkup Ditjen KSDAE dengan realisasi sebesar Rp. 940.731.872.140,- atau sebesar 99,35%, sedangkan alokasi anggaran belanja barang sebesar Rp. 759.073.109.000,- dengan realisasi Rp. 738.094.338.656,- atau sebesar 97,24%, dan pagu anggaran belanja modal sebesar Rp. 130.360.230.000,- dengan realisasi Rp. 124.900.057.779,- atau sebesar 95,81%.

Realisasi berdasarkan Jenis Belanja



Belanja Pegawai

P Rp. 946,86 M
R Rp. 940,73 M

99,35%



Belanja Barang

P Rp. 738,37 M
R Rp. 717,39 M

97,16%



Belanja Modal

P Rp. 128,46 M
R Rp. 122,70 M

95,52%

Alokasi anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan jenis belanja secara berturut-turut proporsi jenis belanja Ditjen KSDAE tahun 2024 yang tertinggi hingga terendah seperti gambar di atas.

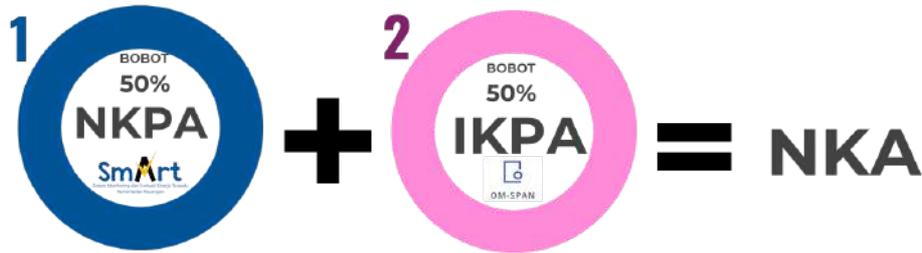
Realisasi berdasarkan Sumber Dana

Pagu Rp. 1.577,44 M Realisasi Rp. 1.556,60 M 98,68% RM	Pagu Rp. 180,64 M Realisasi Rp. 173,58 M 96,09% PNBP	Pagu Rp. 43,33 M Realisasi Rp. 38,66 M 89,22% HLN	Pagu Rp. 34,87 M Realisasi Rp. 34,87 M 100% HLLN
---	---	--	---

Berdasarkan sumber dana Ditjen KSDAE pada tahun 2024 memiliki 4 jenis sumber dana yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN). Alokasi pada sumber dana RM dengan pagu sebesar Rp. 1.577,44 Miliar dengan realisasi sebesar Rp. 1.556,60 Miliar atau dengan persentase capaian yaitu 98,68%, pada sumber dana PNBP dengan pagu sebesar Rp. 180,64 Miliar dengan realisasi sebesar Rp. 173,58 Miliar atau dengan persentase capaian yaitu 96,09%, pada sumber dana HLN dengan pagu sebesar Rp. 43,33 Miliar dengan realisasi sebesar Rp. 38,66 Miliar atau dengan persentase capaian yaitu 89,22%, dan alokasi anggaran pada sumber dana HLLN sebesar Rp. 34,87 Miliar dengan realisasi sebesar Rp. 34,87 Miliar atau dengan persentase capaian yaitu 100% sekaligus menjadi penyerapan anggaran tertinggi pada realisasi berdasarkan sumber dana.

C. NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai kinerja anggaran merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran berdasarkan aspek penyerapan anggaran, pencapaian target kinerja, dan pengelolaan pembendaharaannya. Perhitungan nilai kinerja anggaran ditentukan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50%. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



Nilai NKPA diperoleh melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Nilai ini merupakan salah satu parameter untuk menilai kinerja anggaran. Dalam penilaiannya, nilai NKPA dihitung dengan menggunakan nilai efektivitas dan efisiensi, nilai tersebut didapatkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja perencanaan anggaran adalah: Capaian RO, Capaian Sasaran Program, Capaian Sasaran Strategis, Penggunaan SBK. Sedangkan nilai IKPA diperoleh melalui aplikasi OMSPAN. Nilai ini mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu instansi. Dalam penilaiannya, nilai IKPA menggunakan 3 aspek, yang setiap aspeknya terdapat komponen penilaian lagi yaitu 1) kualitas perencanaan anggaran, dengan komponen 2 penilaian yaitu revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA, 2) kualitas pelaksanaan anggaran, dengan 4 komponen penilaian yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan komponen penilaian adalah capaian output, bobot variabel penilaian kinerja anggaran seperti tabel dibawah ini.

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
	IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
98.10	99.06	99.33	98.67	92.10

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024
(aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/app2024>)

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran	
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA
Nilai	99,4	81,77
Bobot	10	15
Nilai Akhir	9,94	12,27
Nilai Aspek	90.59	

Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran Tahun 2024
(aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>)

Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP
Nilai	93,59	97,23	99,37	96,42
Bobot	20	10	10	10
Nilai Akhir	18,72	9,72	9,94	9,64
Nilai Aspek	96.65			

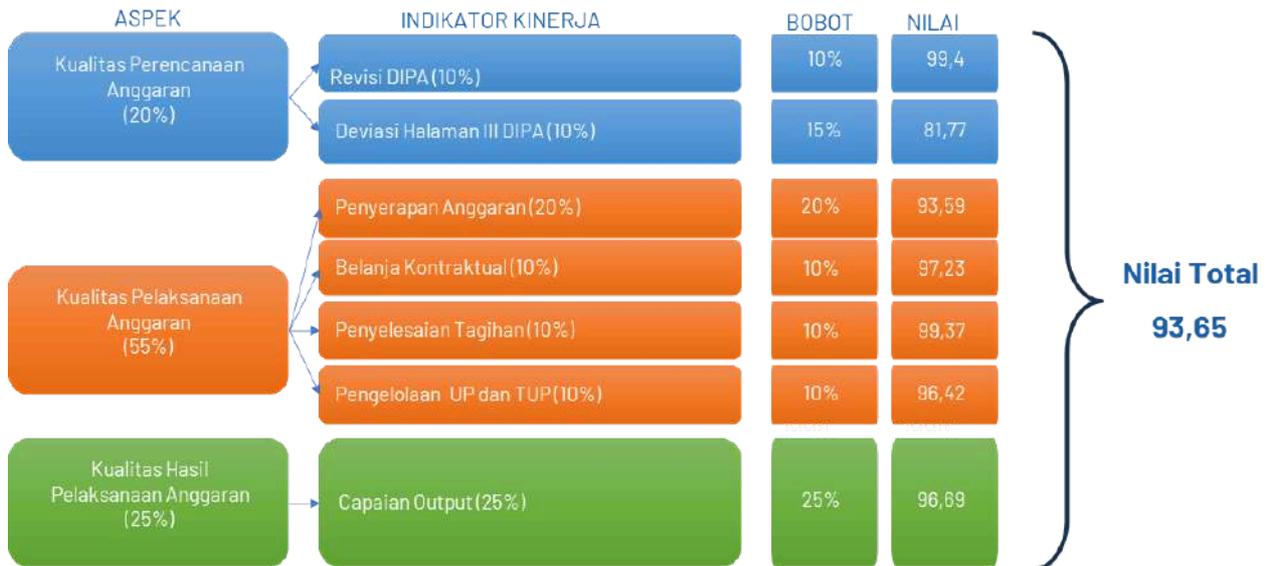
Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024
(aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>)

Keterangan	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
	Capaian Output
Nilai	96,69
Bobot	25
Nilai Akhir	24,17
Nilai Aspek	96.69

Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024
(aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>)

Keterangan	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	90,59
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,65
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	96,69
Nilai Total	94,4
Konversi Bobot	100%
Dispensasi SPM (Pengurang)	0,75
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	93,65

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024
(aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>)



Gambar xxx Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 (Aplikasi OM SPAN 2024)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 (Aplikasi OM SPAN 2024)



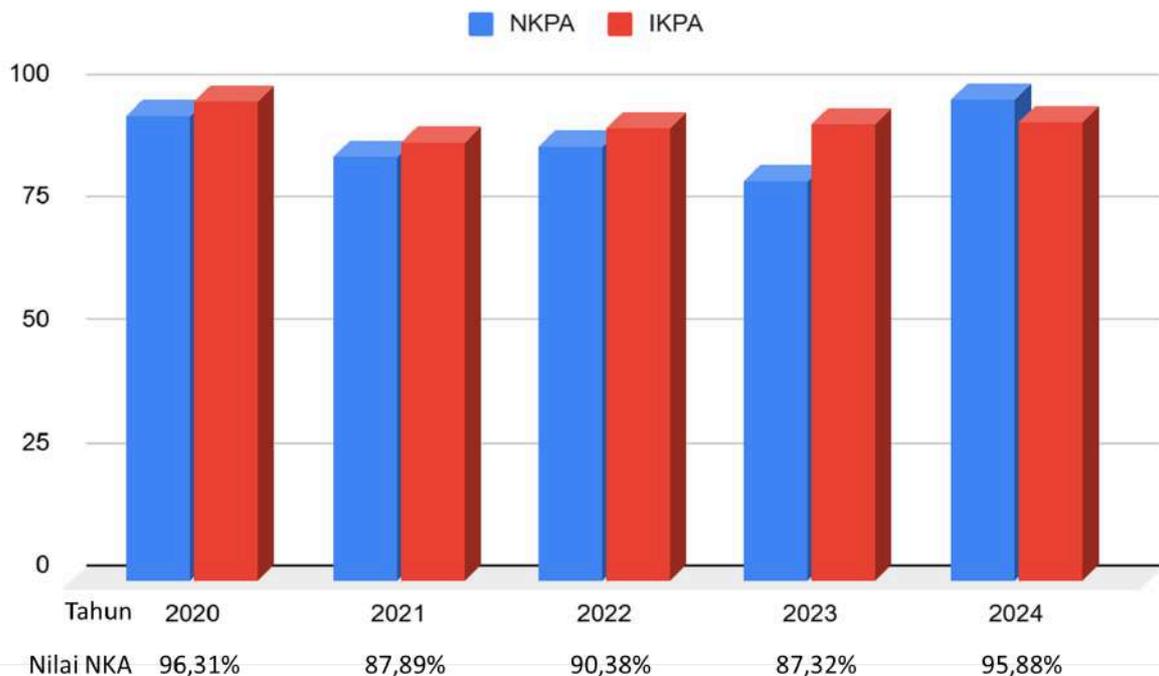
*) IKPA T.A 2024 dan NKPA T.A 2024

Gambar xxx Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 (Aplikasi OM SPAN 2024)

Nilai NKPA Ditjen KSDAE tahun 2024 terpantau sebesar 98,10 yang termasuk dalam kategori Baik. Nilai IKPA Ditjen KSDAE tahun 2024 sebesar 93,65, dengan nilai tiap aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran dengan nilai 90,59, kualitas pelaksanaan anggaran dengan nilai 96,65, kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan nilai 96,69.

Berdasarkan nilai NKPA dan IKPA tersebut diatas, dapat diketahui NKA Ditjen KSDAE tahun 2024 sebesar 95,88% (per 30 Januari 2025). NKA pada Ditjen KSDAE mempunyai nilai yang berfluktuasi. Dalam 5 tahun terakhir, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 96,13%.

Nilai Kinerja Anggaran Per 5 Tahun



Gambar xxx Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran per 5 tahun

D. PEMANTAUAN KEGIATAN TEMATIK

Pada tahun 2024, Ditjen KSDAE mendapatkan mandat untuk turut serta dalam mensukseskan kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yaitu kebijakan kelautan Indonesia 2023. Selain kegiatan kebijakan kelautan Indonesia Ditjen KSDAE juga memantau kegiatan aksi tematik KemenLHK yaitu Program Prioritas Nasional, Kegiatan Ibu Kota Negara (IKN), Kegiatan Perbatasan, Kegiatan Padat Karya.



1. Pemantauan Kantor Staff Presiden

Kegiatan ini berdasarkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2021- 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dimana pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan kebijakan kelautan indonesia disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi secara periodik sesuai dengan Rencana Aksi pada bulan ke-6 (enam), ke-9 (sembilan) dan ke-12 (dua belas) pada setiap tahunnya. Rencana aksi kegiatan ini adalah pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam bahari di Taman Nasional, keberhasilan program dinyatakan dengan terlaksananya kegiatan pengembangan sarana prasarana wisata bahari yang dikembangkan di 7 unit Taman Nasional

NO	UPT	KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME
1	BTN Bunaken	Tersedianya kapal pengawas wisata	589.506.000	2 UNIT
2	BTN Takabonerate	Terselesaikannya pekerjaan pembangunan Gazebo	200.000.000	3 UNIT
3	BTN Kepulauan Togean	Pembangunan Jalan Tambatan Perahu Pos Media Informasi Wisata Katupat	150.000.000	1 UNIT
4	BTN Karimunjawa	Terselesaikannya pekerjaan renovasi trekking mangrove	500.000.000	1 PAKET
5	BTN Wakatobi	Terbangunnya sarpras wisata bahari di SPTN Wilayah I	800.000.000	1 PAKET
6	BTN Teluk Cenderawasih	Tersedianya peralatan pondok kerja dan peralatan untuk mendukung Wisata- tersedianya longboat penunjang wisata BPTN I dan II	300.000.000	2 UNIT
7	BTN Kepulauan Seribu	Terbangunnya sarpras wisata taman biota di SPTN Wilayah II Pulau Harapan	600.000.000	1 UNIT

Tabel xxx Satker Ditjen KSDAE yang mendapatkan kegiatan pengembangan sarana prasarana wisata bahari

2. Pemantauan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)

01

Destinasi wisata alam bahari

Program:	Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi, dan kelestarian lingkungan
Kegiatan:	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
Sasaran:	Berkembangnya wisata alam bahari pada kawasan konservasi
Output:	Jumlah destinasi wisata alam bahari

Target dan Realisasi

Target: 3 TN (TN Wakatobi, TN Bunaken, dan TN Takabonerate)

Realisasi TW IV 2024:

1. BTN Wakatobi: Telah terlaksananya pemeriksaan dan serah terima pekerjaan pembangunan sarpras wisata bahari di SPTN Wilayah I
2. BTN Bunaken: Telah Terlaksananya proses pembuatan kapal penunjang destinasi wisata, pengadaan body kapal penunjang wisata, dan pengadaan kapal pengawas wisata
3. BTN Takabonerate: Telah pelaksanaan pembangunan gazebo

Program:	Penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan
Kegiatan:	Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi
Sasaran:	Tersedianya Dokumen Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi
Output:	Jumlah Data Perencanaan dan Penataan Kawasan Konservasi

Target dan Realisasi

Target: 7 TN Laut (TN Bunaken, TN Takabonerate, TN Kepulauan Togean, TN Karimunjawa, TN Wakatobi, TN Teluk Cenderawasih, TN Kepulauan Seribu)

Realisasi TW IV 2024:

Sudah terlaksana Workshop, sosialisasi, koordinasi, dan konsultasi terkait inventarisasi dan verifikasi kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di 7 Taman Nasional Laut



BTN Bunaken

Pengadaan body kapal penunjang wisata
(gambar bawah)
Terlaksananya pembuatan kapal penunjang
destinasi wisata (gambar samping)



Gambar xxx Kegiatan pengadaan body kapal di BTN Bunaken



Gambar xxx Kegiatan pengerjaan pembangunan sarpras wisata bahari di SPTN Wilayah I BTN Wakatobi



Gambar xxx Pelaksanaan pembangunan gazebo di
BTN Taka Bonerate



Gambar xxx Pelaksanaan pembangunan sarpras wisata taman biota di
SPTN Wilayah II Pulau Harapan BTN Kepulauan Seribu



Gambar xxx Pelaksanaan pembangunan jalan tambatan perahu pos media informasi wisata Katupat BTN Kepulauan Togean



Gambar xxx Pelaksanaan renovasi jalur trekking mangrove BTN Karimun Jawa

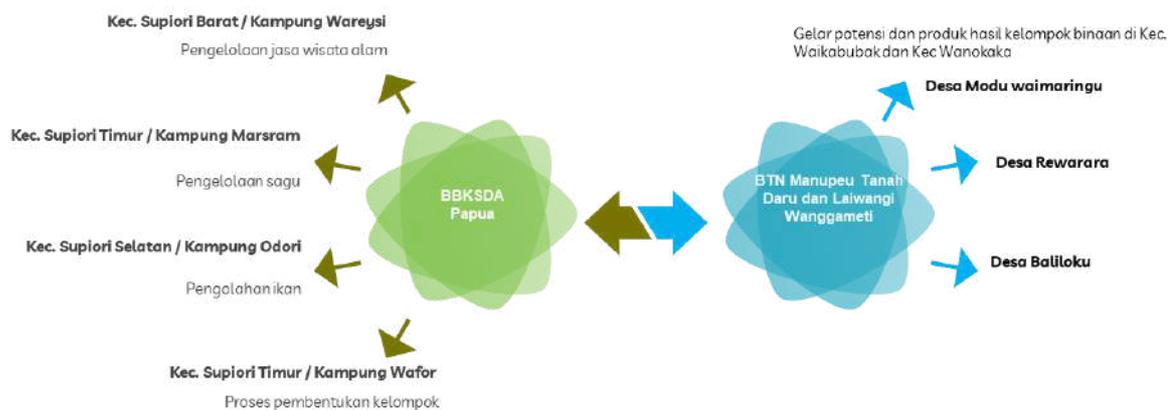


Gambar xxx Pengadaan longboat penunjang wisata BPTN I dan II BTN Teluk Cenderawasih

3. Pemantauan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Presiden No 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) Tahun 2020-2024. Tahun 2024, daerah yang masuk pantauan program ini adalah pada Kabupaten Supiori, Papua dan Kabupaten Sumba Barat, NTT.

Satker Ditjen KSDAE yang mendukung program ini adalah BBKSDA Papua dan BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti. Pelaksanaan di BBKSDA Papua pada 4 desa dan BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti pada 3 desa.



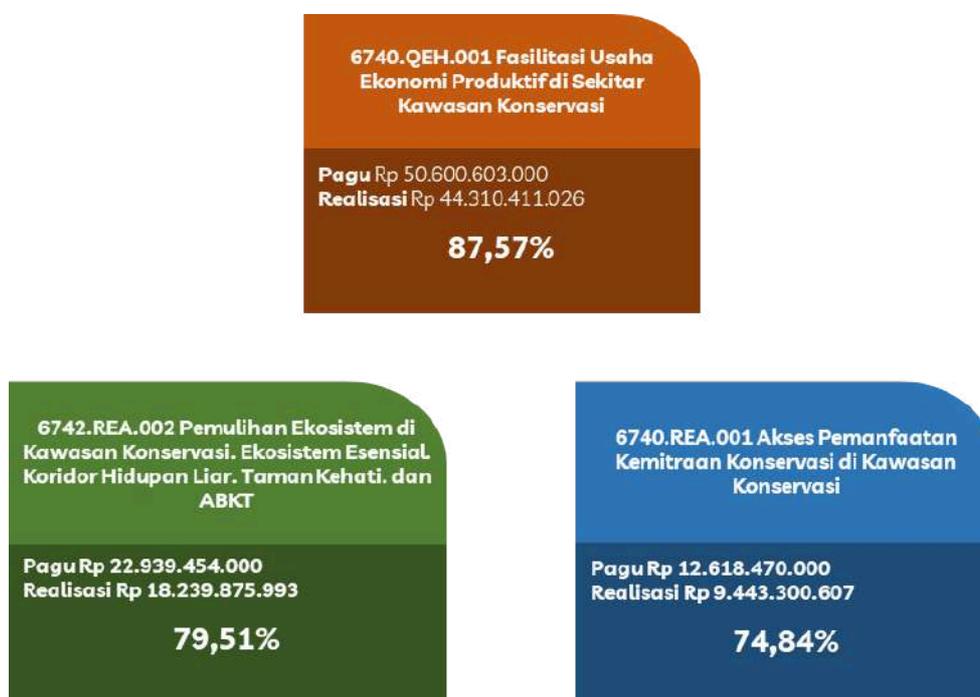
Satker	Kecamatan	Desa	Nilai (Rp.)	Keterangan
BBKSDA Papua	Kab. Supiori, Kec. Supiori Barat	1. Kampung Waryei	15,000,000	Pengelolaan jasa wisata alam
	Kab. Supiori, Kec. Supiori Timur	2. Kampung Marsram	15,000,000	Pengelolaan sagu
	Kab. Supiori, Kec. Supiori Selatan	3. Kampung Odori	15,000,000	Pengolahan ikan
	Kab. Supiori, Kec. Supiori Selatan	4. Kampung Biniki	26,500,000	Pengelolaan buah mangrove
BTN Matalawa	Kab Sumba Barat, Kec Waikabubak, Kec. wanokaka	1. Desa Modu waimaringu	34,850,000	gelar potensi dan produk hasil kelompok binaan
		2. Desa Rewarara		
		3. Desa Baliloku		

4. Pemantauan Padat Karya

Pelaksanaan program padat karya pada Ditjen KSDAE di 74 Satker yang terdiri dari 26 Satker KSDA dan 48 Satker Taman Nasional. Ukuran keberhasilan program dilihat dari kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung yang diketahui melalui jumlah tenaga kerja (HOK). Kegiatan di tahun 2024 yang mendukung kegiatan padat karya yaitu :

RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN	REVISI ALOKASI	CAPAIAN FISIK	CAPAIAN FISIK %	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN %
Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Sekitar Kawasan Konservasi	575	Kelompok Masyarakat	50.600.603.000	586	101,91%	44.310.411.026	87,57%
Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	26.250	Hektar	12.618.470.000	17.528,62	66,78%	9.443.300.607	74,84%
Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	12.100,26	Hektar	22.939.454.000	11806,46	97,57%	18.239.875.993	79,51%

Tabel xxx Kegiatan pendukung pada pelaksanaan program padat karya tahun 2024





BAB IV

PENUTUP



PENUTUP

Laporan kinerja Ditjen KSDAE tahun 2024 menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK. Pencapaian kinerja diukur melalui enam indikator kinerja program dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111,12%.

Capaian indikator kinerja program tersebut yaitu: 1) Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi terealisasi seluas 15.611.293,24 hektar atau 150% (156,11%) dari target 10 juta hektar; 2) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif terealisasi seluas 13.020.000 hektar atau 108,5% dari target 12 juta hektar; 3) Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa yang lestari dan berkelanjutan terealisasi Rp 1,73 Triliun atau 80,56% dari target Rp 2,15 Triliun; 4) Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari terealisasi Rp 185,75 Miliar atau 80,76% dari target Rp 230 Miliar; 5) Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terealisasi 879 desa atau 87,90% dari target 1.000 desa; dan 6) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terealisasi 79,88 poin atau 102,41% dari target 78 poin. Rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 101,69%.

Pencapaian kinerja Ditjen KSDAE didukung dengan alokasi PAGU anggaran sebesar Rp. 1.813.706.714.000,- dengan realisasi Rp. 1.803.726.268.575,- pencapaian dalam persentase yaitu 98,23% berdasarkan data dari omspan tahun anggaran 2024 per tanggal 30 Januari 2025. Perbandingan persentase antara penyerapan anggaran dengan persentase rata-rata capaian kinerja diperoleh nilai 0,88 yang berarti Ditjen KSDAE efisien dalam penggunaan anggarannya untuk pencapaian kinerja. Atas capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024, Ditjen KSDAE akan terus meningkatkan kinerja pembangunan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Kedepan, Ditjen KSDAE akan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi dengan melakukan transformasi tata kelola kawasan konservasi berbasis lanskap, ekosistem dan masyarakat sehingga didapat manfaat baik bagi kelestarian alam maupun kesejahteraan masyarakat. Sebagai akhir dari laporan kinerja ini, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa semoga Ditjen KSDAE dapat meningkatkan sinkronisasi dan sinergi dengan seluruh pihak untuk dapat bersama-sama membangun tapak kawasan hutan serta bekerjasama dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Direktorat Jenderal KSDAE

Penugasan untuk pelaksanaan program dari Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2024. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KSDAE tahun 2024 terdiri dari 6 sasaran program dan 7 indikator kinerja program.

Program Dukungan Manajemen

Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	80 Poin

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
<input type="checkbox"/> Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif	19 Juta Hektar
<input type="checkbox"/> Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL yang lestari dan berkelanjutan	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif	860 Miliar Rupiah
<input type="checkbox"/> Meningkatnya PNBP dari hasil pengelolaan jasa lingkungan KK dan pemanfaatan TSL secara lestari	Nilai PNBP dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL secara lestari	250 Miliar Rupiah
<input type="checkbox"/> Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	725 Desa

Program Kualitas Lingkungan Hidup

Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif di luar kawasan konservasi	9.350.000 Hektar

Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE Triwulan IV Tahun 2024

Pencapaian kinerja Ditjen KSDAE tahun 2024 diukur melalui pelaksanaan 6 indikator kinerja program sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Menteri LHK.

Program Dukungan Manajemen

Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja / %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	82,31 poin 102,89 %

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja / %
<input type="checkbox"/> Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif	26,80 Juta Hektar 141,05 %
<input type="checkbox"/> Meningkatkan nilai ekspor pemanfaatan TSL yang lestari dan berkelanjutan	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif	850 Miliar Rupiah 99,97 %
<input type="checkbox"/> Meningkatkan PNBP dari hasil pengelolaan jasa lingkungan KK dan pemanfaatan TSL secara lestari	Nilai PNBP dari pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan TSL secara lestari	236 Miliar Rupiah 94,40 %
<input type="checkbox"/> Meningkatkan kemitraan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	904 Desa 124,68 %

Program Kualitas Lingkungan Hidup

Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja / %
Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati secara partisipatif di luar kawasan konservasi	9.353.269,34 Hektar 106,45 %

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023 (Revisi)



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.

Jabatan : MENTERI KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua selaku pengampu BA.029 TA.2024 akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,


RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.

Pihak Pertama,


Prof. Dr. SATYAWAN PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc
NIP. 19710809 199512 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No.	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Menurunnya laju penyusutan hutan	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	19 Juta Ha	19 Juta Ha
b.	Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan	2,2 Triliun Rupiah	860 Miliar Rupiah
c.	Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	Nilai PNBP dari Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara Lestari	250 Miliar Rupiah	250 Miliar Rupiah
d.	Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	Meningkatnya kemitraan konservasi dalam pengelolaan Kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	1.200 Desa	725 Desa

Program : Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	9.350.000 Ha	9.350.000 Ha

Program : Dukungan Manajemen

No.	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	80 Poin	80 Poin
			Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	95,03 Poin	82,5 Poin

Catatan:

1. Terdapat perubahan metode pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.
2. Terdapat anggaran terblokir sebesar Rp6.810.817.000 dikarenakan Kebijakan Nasional *Automatic Adjustment* dan Penghematan Perjalanan Dinas.
3. Terdapat perubahan target Indikator Kinerja Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat menjadi 725 Desa akibat dinamika kelompok di lapangan serta penurunan alokasi anggaran yang terdampak *Automatic Adjustment* dan Pemenuhan Belanja Operasional lingkup Ditjen KSDAE.
4. Terdapat perubahan target Indikator Kinerja Nilai Ekspor Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan menjadi 860 Milyar, beberapa faktor penurunan antara lain: adanya Kebijakan pemindahan pengelolaan (management authority) oleh Pemerintah untuk jenis ikan bersirip yang sebelumnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), krisis ekonomi global yang berpengaruh terhadap nilai/harga dari komoditi TSL, dan terkendala dalam pemenuhan persyaratan perizinan terkait dengan pemanfaatan TSL khususnya untuk dokumen persetujuan lingkungan.

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp587.866.887.000,-	Rp498.244.603.000,-
1.	Perencanaan Kawasan konservasi		
2.	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik		
3.	Pengelolaan Kawasan Konservasi		
4.	Pemulihan Ekosistem		
5.	Pemanfaatan Jasa dan Lingkungan Kawasan Konservasi		
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Rp10.419.951.000,-	Rp7.323.442.000,-
6.	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial		
	Program Dukungan Manajemen	Rp1.175.673.270.000,-	Rp1.308.138.669.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		
	Jumlah	Rp1.773.960.108.000,-	Rp1.813.706.714.000,-

Jakarta, Desember 2024

MENTERI KEHUTANAN
SELAKU PENGAMPU BA.029 TA.2024 PADA MASA TRANSISI



RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.

DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Prof. Dr. SATYAWATI PUDYATMOKO, S.Hut., M.Agr.Sc
NIP. 19710809 199512 1 001

2. Realisasi anggaran Satker lingkup Ditjen KSDAE tahun 2024 (Sumber: OMSPAN Ditjen KSDAE per-tanggal 30 Januari 2025)

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BTN WAKATOBI	17.187.910.000	17.181.210.177	99,96%
2	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	18.566.300.000	18.553.269.817	99,93%
3	BTN TAKA BONERATE	14.644.050.000	14.636.182.016	99,95%
4	BTN GUNUNG MERAPI	20.488.250.000	20.416.270.231	99,65%
5	BKSDA SULAWESI TENGGARA	20.369.576.000	20.335.983.796	99,84%
6	BKSDA D.I YOGYAKARTA	17.865.113.000	17.829.149.502	99,80%
7	BTN KEP. SERIBU	14.560.563.000	14.532.866.467	99,81%
8	BTN BUNAKEN	10.948.441.000	10.925.284.709	99,79%
9	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	20.649.130.000	20.606.417.082	99,79%
10	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	19.415.630.000	19.371.695.526	99,77%
11	BTN BUKIT 12	13.512.125.000	13.471.902.959	99,70%
12	BTN KARIMUN JAWA	20.228.600.000	20.177.353.729	99,75%
13	BBTN TELUK CENDERAWASIH	28.311.318.000	28.237.592.287	99,74%
14	BTN GUNUNG MERBABU	15.069.505.000	15.028.535.232	99,73%
15	BTN SEBANGAU	17.284.235.000	17.284.235.000	100,00%
16	BTN MERU BETIRI	17.340.500.000	17.280.526.164	99,65%
17	BKSDA BALI	18.207.106.000	18.152.227.112	99,70%
18	BKSDA DKI JAKARTA RAYA	19.773.845.000	19.707.911.365	99,67%
19	BTN BATANG GADIS	15.042.510.000	14.993.912.868	99,68%
20	BBTN KERINCI SEBLAT	34.647.200.000	34.527.829.573	99,66%
21	BTN TAMBORA	13.432.250.000	13.385.444.787	99,65%
22	BTN BOGANI NANI WARTABONE	16.641.550.000	16.582.239.750	99,64%
23	BTN TANJUNG PUTING	17.877.700.000	17.803.926.571	99,59%
24	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	28.488.755.000	28.382.435.741	99,63%
25	BTN MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI	16.109.170.000	16.034.021.557	99,53%
26	BTN GUNUNG CEREMAI	16.400.530.000	16.336.449.563	99,61%
27	BKSDA MALUKU	25.547.920.000	25.442.332.666	99,59%
28	BKSDA NANGROE ACEH DARUSSALAM	24.019.200.000	23.913.217.729	99,56%
29	BKSDA JAMBI	14.437.150.000	14.366.718.261	99,51%
30	BTN ALAS PURWO	18.400.750.000	18.307.689.857	99,49%

NO	SATUAN KERJA	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
31	BTN BUKIT TIGA PULUH	15.324.000.000	15.244.821.619	99,48%
32	BTN GUNUNG RINJANI	21.197.630.000	21.087.397.973	99,48%
33	BTN SIBERUT	15.492.675.000	15.406.962.280	99,45%
34	BBKSDA PAPUA BARAT	29.165.000.000	28.995.081.363	99,42%
35	BTN GUNUNG PALUNG	14.176.500.000	14.079.112.869	99,31%
36	BTN GUNUNG HALIMUN	22.615.092.000	22.476.377.097	99,39%
37	BTN BALURAN	16.824.050.000	16.697.958.385	99,25%
38	BTN KELIMUTU	13.284.500.000	13.176.857.415	99,19%
39	BBKSDA RIAU	36.083.552.000	35.779.987.867	99,16%
40	BTN WASUR	18.771.720.000	18.609.520.800	99,14%
41	BTN KEPULAUAN TOGEAN	15.072.034.000	14.937.795.534	99,11%
42	BKSDA JAWA TENGAH	30.450.900.000	30.185.588.323	99,13%
43	BKSDA BENGKULU	27.705.187.000	27.455.684.782	99,10%
44	BTN UJUNG KULON	20.437.742.000	20.232.158.298	98,99%
45	BTN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG	20.186.565.000	19.992.272.545	99,04%
46	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	19.126.695.000	18.913.748.309	98,89%
47	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	25.169.490.000	24.887.507.345	98,88%
48	BTN BALI BARAT	17.720.150.000	17.512.275.620	98,83%
49	BBKSDA SUMATERA UTARA	41.196.974.000	40.690.845.761	98,77%
50	BTN TESSO NILO	17.290.241.000	17.068.345.495	98,72%
51	BKSDA SUMATERA SELATAN	35.001.011.000	34.547.114.452	98,70%
52	BKSDA SULAWESI UTARA	13.699.645.000	13.523.324.387	98,71%
53	BKSDA SULAWESI TENGAH	19.075.325.000	18.828.766.321	98,71%
54	BBKSDA JAWA TIMUR	34.582.300.000	34.086.348.463	98,57%
55	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	27.274.400.000	26.818.984.386	98,33%
56	BTN KOMODO	23.525.042.000	23.175.255.268	98,51%
57	BTN AKETAJAWE-LOLOBATA	12.205.850.000	12.021.842.008	98,49%
58	BTN MANUSELLA	16.116.011.000	15.865.551.789	98,45%
59	BBKSDA JAWA BARAT	40.742.395.000	40.042.114.270	98,28%
60	BBTN GUNUNG LEUSER	28.769.550.000	28.253.956.602	98,21%

NO	SATUAN KERJA	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%
61	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	27.038.800.000	26.532.556.597	98,13%
62	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	28.422.500.000	27.861.294.773	98,03%
63	BKSDA KALIMANTAN BARAT	27.008.987.000	26.471.109.120	98,01%
64	BBTN LORE LINDU	24.287.385.000	23.747.015.892	97,78%
65	BTN LORENTZ	18.369.770.000	17.923.665.623	97,57%
66	BTN KAYAN MENTARANG	14.006.500.000	13.661.396.015	97,54%
67	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE	209.108.403.000	203.061.639.874	97,11%
68	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	21.322.765.000	20.654.673.659	96,87%
69	BTN KUTAI	16.205.300.000	15.657.126.006	96,62%
70	BBKSDA PAPUA	33.297.700.000	32.106.992.189	96,42%
71	BKSDA SUMATERA BARAT	23.814.090.000	22.781.407.917	95,66%
72	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	22.784.500.000	21.772.767.884	95,56%
73	BBKSDA SULAWESI SELATAN	45.078.863.000	42.098.063.971	93,39%
74	BTN WAY KAMBAS	33.722.220.000	31.366.660.163	93,01%
75	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	38.082.290.000	33.368.644.015	87,62%
76	BBTN GUNUNG LEUSER	1.000.000	-	0,00%
TOTAL		1.836.300.181.000	1.803.726.268.575	98,23%

3. Data Capaian Kerja Sama Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Tahun 2024

KODE Jenis Kemkon Tahun	Sudah TTD PKS PM 2024			
		Pokmas	Anggota	Luas (Ha)
Banten				
BTN Ujung Kulon				
KPMH Cidarhayu Berkah		1	36	49.63
KPMH Odeng Barokah		1	45	49.53
KPMH Odeng Ujung Kulon Berkah		1	17	49.77
KPMH Panaitan Berkah		1	30	49.86
KPMH Panaitan Jaya		1	27	45.59
KPMH Panaitan Lestari		1	37	49.94
KPMH Panaitan Subur		1	50	49.02
KPMH Panaitan Unggul		1	46	45.51
Banten Total		8	288	388.85
Jawa Tengah				
BTN Karimunjawa				
Kelompok Kerja Kawasan Pengelolaan Desa (KPDN) Nyamuk		1	25	10,953.98
SPKP Prima		1	20	13,637.89
Jawa Tengah Total		2	45	24,591.87
Kalimantan Barat				
BTN Gunung Palung				
KTH Air Tersik		1	18	70.32
KTH Belauk Pucat Bersatu		1	15	313.81
		Pokmas	Anggota	Luas (Ha)
KTH Jaya Aren Makmur		1	15	94.20
KTH Takon Bersatu		1	18	33.23
Kalimantan Barat Total		4	66	511.56
Kalimantan Utara				
BTN Kayan Mentarang				
Pokmas Tani Mitra Rungan Sukses		1	33	969.84
Kalimantan Utara Total		1	33	969.84
Lampung				
BBTN Bukit Barisan Selatan				
KTH Damar Paseban		1	15	40.10
Lampung Total		1	15	40.10
Maluku Utara				
BTN Aketajawe Lolobata				
KTH Pomaka Lega		1	15	420.64
KTH Putra Durian		1	24	420.62
Maluku Utara Total		2	39	841.26
Nusa Tenggara Timur				
BBKSDA NTT				
Pokmas Batu Piak		1	16	63,881.90
Pokmas Dalek Esa		1	21	167.38
Pokmas Lumba-Lumba		1	16	63,881.90
Pokmas Nona Opa		1	27	106.60
Pokmas Pantai Nunsui		1	23	523.00
Nusa Tenggara Timur Total		5	103	128,560.78
Papua Barat				

	Pokmas	Anggota	Luas (Ha)
BBTN Teluk Cenderawasih			
Pokmas Meos Fbepiar	1	25	1,010.00
Pokmas Paray Vesie	1	27	960.00
Pokmas Tanawai	1	32	1,100.00
Papua Barat Total	3	84	3,070.00
Papua Selatan			
BTN Wasur			
Milrav Waninggap Nanggo	1	22	146.80
Naumal	1	15	352.00
Nii Neh Nteko	1	15	1,324.71
Sokodu Mbur	1	15	685.10
Papua Selatan Total	4	67	2,508.61
Papua Tengah			
BTN Lorentz			
Pokmas Pirapi	1	15	500.38
Pokmas Sawatia	1	15	500.64
Papua Tengah Total	2	30	1,001.02
Sulawesi Selatan			
BTN Bantimurung			
Bulusaraung			
KT. Banga Bangae	1	48	489.98
KT. Bukit Harapan	1	40	23.70
KT. Bulu Tanete	1	32	94.60
KT. Labongke	1	22	14.06
KT. Pattanyamang I	1	48	151.04
KT. Pattanyamang II	1	20	81.75
	Pokmas	Anggota	Luas (Ha)
KT. Sonrae	1	50	71.41
KT. Tunas Muda	1	31	55.70
KT. Wanua Deceng	1	34	37.96
KTH Mariorennu	1	15	176.60
KTH Wanua Lestari	1	15	97.88
KTH. Pattiro Bulu	1	30	61.10
BTN Taka Bonerate			
KN Usaha Bersama	1	15	6,810.36
Sulawesi Selatan Total	13	400	8,166.14
Sulawesi Tenggara			
BKSDA Sulawesi Tenggara			
Kelompok Padamarang Lestari	1	21	4,000.00
KN Harapan Baru	1	15	500.00
KN Karya Bahari	1	14	500.00
KU Padakauang	1	18	1,000.00
BTN Rawa Aopa			
Watunohai			
KN Muara Labasi	1	14	184.00
KN Samaturu	1	14	806.00

Sulawesi Tenggara Total	6	96	6,990.00
Sulawesi Utara			
BTN Bogani Nani			
Wartabone			
KTH Argomukti	1	74	133.00
KTH Motobatu	1	18	65.00
KTH Tapaklinow	1	88	171.65
BTN Bunaken			
Pokmas Bintang Fajar	1	10	180.00
Sulawesi Utara Total	4	190	549.65
Sumatera Utara			
BTN Batang Gadis			
KTH Tarutung Sirogas	1	21	42.79
Sumatera Utara Total	1	21	42.79
Grand Total	56	1,477	178,232.47

4. Data penerimaan PNPB dari Tumbuhan dan Satwa Liar Per Satker Ditjen KSDAE Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	PNBP TSL (Rp)	NO	UNIT KERJA	PNBP TSL (Rp)
1	Direktorat KKHSG	15,473,631,271	15	BKSDA Jakarta	91,895,000
2	BBKSDA Sumut	366,721,250	16	BKSDA Jawa Tengah	106,995,150
3	BBKSDA Riau	85,612,000	17	BKSDA Yogyakarta	39,975,475
4	BBKSDA Jabar	576,247,270	18	BKSDA Bali	64,784,700
5	BBKSDA Jatim	1,352,348,167	19	BKSDA NTB	36,817,526
6	BBKSDA NTT	125,906,450	20	BKSDA Kalbar	424,385,480
7	BBKSDA Sulsel	328,830,742	21	BKSDA Kalteng	718,659,200
8	BBKSDA Papua	3,277,763,549	22	BKSDA Kalsel	87,795,600
9	BBKSDA Papua Barat	282,714,200	23	BKSDA Kaltim	139,671,900
10	BKSDA NAD	165,979,375	24	BKSDA Sulteng	100,427,906
11	BKSDA Sumbar	116,083,350	25	BKSDA Sultra	136,280,196
12	BKSDA Jambi	132,887,500	26	BKSDA Sulut	136,616,000
13	BKSDA Sumsel	845,127,990	27	BKSDA Maluku	538,990,520
14	BKSDA Bengkulu	244,455,665	TOTAL		25.961.603.432



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. +62 21 5730301 - 5730316
Fax +62 21 5733437